

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENENTUAN IBUKOTA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
DAERAH**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SARDA SAFITRI

NIM. 10400117009

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sarda Safitri
NIM : 10400117009
Tempat/ Tgl Lahir : Enrekang, 18 November 1999
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Penentuan Ibukota Provinsi
Kalimantan Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan,
Penghapusan Dan Penggabungan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan rujuk berdasarkan pada kode etik ilmiah.

Makassar, 08 Maret 2021

Penulis,

Sarda Safitri

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penentuan Ibukota Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah”, yang disusun oleh Sarda Safitri, NIM: 10400117009, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 M, bertepatan dengan 05 Rajab 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 17 Februari 2021 M
05 Rajab 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Muammar Muh. Bakry, Lc., M.Ag	(.....)
Sekretaris: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Pembimbing I : Dr. Jumadi S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing II: Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H.	(.....)
Penguji I : Ahkam Jayadi S.H., M.H.	(.....)
Penguji II: Prof. Dr. H. Kasjim Salenda, S.H., M.Th.I	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah *subhanahu wata'ala* yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini ditengah pandemi covid-19 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penentuan Ibukota Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu terdapat kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan kritikan positif yang sifatnya membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini masalah dan hambatan tentu ada apalagi ditengah pandemi covid-19 tetapi alhamdulillah semuanya terselesaikan atas izin Allah dan bantuan orang lain. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, ayahanda Muhammad Sabir/Irwan dan ibunda Helmiati/Haspiah yang tidak pernah ada kata lelah mendo'kan dan memotivasi hingga bisa sampai pada titik ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Dr. Jumadi, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan bapak Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H. selaku pembimbing II atas arahan, motivasi dan bimbingannya hingga

akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada bapak Ahkam Jayadi, S.H., M.H. selaku penguji I dan bapak Prof. Dr. H. Kasjim Salenda, S.H., M.Th.I selaku penguji II.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof Hamdan Juhannis, M.A., Ph. D. selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II, III, dan IV UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M. Ag. selaku Dekan beserta wakil dekan I, II, dan III fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Abd. Rais Asmar, S.H., M.H selaku Sekretaris jurusan Ilmu Hukum fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Akademik dan Pegawai fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. Andi Safriani, S.H., M.H. yang merupakan salah satu dosen di jurusan ilmu hukum yang begitu saya kagumi. Ibu Rani, seperti itulah biasa saya menyapanya. Bagi saya, beliau adalah pembimbing ke III yang terus ada selama proses pembuatan skripsi ini. Seseorang yang tidak hanya berperan sebagai tenaga pendidik di bangku perkuliahan, tetapi beliau juga selalu membuat saya merasa memiliki ibu sekaligus kakak di tanah perantauan. Beliau yang di tengah kesibukannya, senantiasa

menyempatkan waktu untuk bisa mendengar keluhan-keluhan saya, dengan lembut beliau memberi pencerahan dan juga nasihat-nasihat baik agar saya tetap bertahan dan terus berjuang hingga menggapai apa yang saya cita-citakan. Meski sebenarnya tidak mudah menemukan tempat untuk menumpahkan keresahan, menceritakan berbagai gejolak dalam jiwa, akan tetapi beliau selalu memiliki cara untuk membuat saya percaya. Sejak awal perjumpaan dengannya, saya sudah menganggapnya sebagai rumah. Disana saya menemukan sosok beliau yang dengan kesabaran luar biasa, mengarahkan serta menuntun saya hingga berhasil menyelesaikan pendidikan. Terima kasih saya ucapkan kepada beliau, serta rasa syukur saya yang tiada henti-hentinya mengalir karena Allah yang maha baik telah mengizinkan perjumpaan ini. Saya berharap, hubungan baik ini tidak akan hancur digerus jarak dan waktu.

7. Kepada Kakanda Muhammad Vhauzy, S.IP. M.AP. saya ucapkan terima kasih banyak karena turut serta berperan penting di dalam penyusunan skripsi ini. Beliau yang akrab saya sapa bang ozzy adalah senior yang begitu ramah, mudah diajak berdiskusi dan memberikan banyak bimbingan untuk saya yang sangat pemula ini. Meski kerap kali saya menyita waktunya untuk mengeluhkan banyak hal, akan tetapi beliau senantiasa memberikan saran-saran terbaiknya. Di tengah kesibukan-kesibukan yang beliau jalani, tetap saja akan merespon cepat jika saya memerlukan pendapat atau solusi. Meskipun tidak tau dengan apa saya bisa membalas jasa beliau, tapi ucapan syukur tak henti-hentinya tercurah

untuk kesempatan yang Allah berikan sehingga bisa mengenal beliau.

8. Kepada Abangku Muhajidin, S.T. Terimakasih atas dukunganya selama ini. Seseorang yang menjadi tempat saya untuk menumpahkan segala masalah, yang mungkin sudah bosan mendengar keluhan-keluhan saya, yang tak segan memarahi saya ketika mulai malas dalam mengerjakan berbagai hal. Maafkan adikmu ini bang, jika kerap kali menyulut emosi, jika membuat kesabaranmu menipis. Banyak hal yang saya pelajari darimu, tentang bagaimana bertahan di tanah rantau, tentang bagaimana menerima perubahan-perubahan yang menekankan sulitnya menjadi orang dewasa, tentang semangat yang terus ada meski sedang berada jauh dari orang tua. Sekali lagi terimakasih, tetaplah seperti ini dan jangan pernah berubah. Tetaplah berbuat baik meski itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang tapi pahalanya akan terus ada.
9. Kepada keluarga saya tercinta, ibu dan ayah. Nenek dan kakek. Adik, tante, paman, sepupu dan seluruh keluarga besar Hadinda dan Muhaidir. Saya tau, banyak harapan dan mimpi-mimpi luar biasa yang kalian titipkan kepada saya. Melepas saya pergi ke tanah rantau untuk mengejar gelar yang saya inginkan, pasti rasanya berat. Akan tetapi, kepergian saya yang jauh dari rumah ini mengajarkan saya begitu banyak hal. Seperti hidup mandiri, mendapatkan banyak teman dan yang paling terpenting adalah bagaimana saya yang kini benar-benar bisa menghargai sebuah kabar. Dulu bagi saya sebuah kabar adalah hal yang biasa saja, ada atau tidak adanya kabar rasanya sama saja. Namun setelah adanya jarak, saya

mengerti esensi dari kabar itu sendiri. Bagaimana kabar menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui, bahkan ada yang rela menunggu begitu lama demi untuk mendengar kabar bahwa saya masih yang baik-baik saja. Terima kasih kepada kalian keluarga tercinta saya, yang sedari dulu selalu ada untuk mendukung apapun pilihan saya. Meski tidak seperti kebanyakan keluarga yang lain, kalian punya cara tersendiri untuk membuktikan bahwa kalian akan terus kebersamai saya di setiap langkah. Walaupun tak pernah saya dengar langsung, tapi saya tau bagaimana besarnya rasa sayang kalian kepada saya. Maaf untuk segala masalah yang pernah saya buat, maaf untuk segala kekhawatiran, maaf untuk segala air mata yang tumpah, maaf karena sampai detik ini saya masih menjadi beban dalam keluarga. Teruntuk hati yang mendoakan saya tanpa henti, terima kasih.

10. Kepada sahabatku Anggy Rahman, S.H., Srinur Hatijah, S.H. dan Irmawati terima kasih telah menjadi sosok yang tak pernah meninggalkan saya disaat fase terburuk. Kalian selalu bisa meyakinkan bahwa saya tidak pernah sendiri untuk menghadapi berbagai kenyataan-kenyataan menyakitkan selama proses perkuliahan. Meski dengan peran masing-masing, kalian selalu punya celah agar membuat saya bisa tersenyum. Terimakasih telah banyak membantu saya, terimakasih sudah mau saya repotkan. Kalian mengajarkan saya bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli di dunia ini, yakni waktu dan doa-doa kalian.

11. Kepada teman-teman kelas Ilmu Hukum A Terimakasih atas dukungan

dan do'anya selama ini.

12. Kepada teman-teman KKN-DK angkatan 64 sektor Tarakan atas do'a dan bantuannya selama ini.
13. Bapak Udin Hianggio, selaku tokoh pejuang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara atas kesediaan dan waktu yang diberikan untuk di wawancarai.
14. Bapak Dian Suryanata, selaku Kassubid Penelitian Sumber Daya (Bappeda Kalimantan Utara atas kesediannya untuk di wawancarai.
15. Bapak Mahmud, Ibu Nengsih, Fania Sari, Arselino Septa Selaku warga dan mahasiswa dari Tanjung Selor Terimakasih atas kesediannya untuk diwawancarai.
16. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas partisipasi, dukungan dan do'anya selama penyusunan skripsi ini.

Demikian kata pengantar ini semoga skripsi ini memberi manfaat bagi kita semua dan untuk menambah pengetahuan. Sebagai hamba yang penuh keterbatasan, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan untuk itu atas segala ucapan yang tidak berkenan dalam skripsi ini penulis meminta maaf untuk itu.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 08 Maret 2021
Penulis,

Sarda Safitri

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus	7
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu	9
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	13
A. Pengertian dan fungsi Pemerintah Daerah	13
B. Dasar Hukum Penentuan Ibukota Provinsi Kalimantan Utara	16
C. Aspek Yang Mempengaruhi Penentuan Ibukota Proinsi Kalimantan Utara.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Sumber Data Penelitian	45
D. Metode Pengumpulan Data	46
E. Instrumen Penelitian.....	47
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Pengaturan Penentuan Ibukota Provinsi Kalimantan Utara	51
C. Implementasi Tanjung Selor Sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara.....	53
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

ABSTRAK

Nama : Sarda Safitri
NIM : 10400117009
Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penentuan Ibukota Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh gencarnya praktik pembentukan daerah otonomi baru yang melibatkan provinsi ataupun Kabupaten/kota setelah Indonesia memasuki era reformasi. Selain melihat banyaknya fenomena pemekaran daerah, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum dalam proses pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Adapun persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni bagaimana proses pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, apakah benar tata cara yang dilakukan dalam pembentukan telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dan Bagaimana evaluasi dari penentuan Tanjung Selor sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara. Selaras dengan perkara yang akan diteliti, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif yang memanfaatkan pendekatan yuridis sosiologis dengan cara mengambil data primer melalui prosesi wawancara dan menggolah bahan hukum primer, tersier serta sekunder untuk pengambilan data sekunder.

Dari penelitian ini, dapat ditarik serangkaian kesimpulan bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dari segi normatif menurut syarat administratif, syarat teknis dan juga syarat fisik kewilayahan. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dan juga kendala, akan tetapi eksistensi Provinsi Kalimantan Utara dapat dimulai ketika terbit Undang Undang No. 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, yang sekaligus juga menentukan Tanjung Selor (Bulungan) sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Tidak berhenti pada RUU DOB yang sah menjadi UU, tujuan dibentuknya daerah otonomi baru harus tetap dilakukan. Upaya di dalam meningkatkan pelayanan publik, upaya percepatan dan pemerataan pembangunan, pengasahan potensi daerah, pengembangan kemandirian (tidak tergantung lagi pada pemerintah pusat), serta peningkatan berbagai sektor yang dilaksanakan demi mencapai kesejahteraan masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), Pelayanan Publik, Provinsi Kalimantan Utara*

Abstract

This research is motivated by the incessant practice of forming new autonomous regions involving provinces or districts / cities after Indonesia entered the reform era. Apart from seeing the many phenomena of regional expansion, this study also aims to determine the effectiveness of the law in the process of forming the Province of North Kalimantan. As for the issues to be discussed in this research, namely how the process of forming North Kalimantan Province, is it true that the procedures carried out in the formation are in accordance with the requirements stipulated under Government Regulation Number 78 of 2007 concerning Procedures for the Formation, Abolition and Merger of Regions and How is the evaluation of determining Tanjung Selor as the capital of North Kalimantan Province. In line with the case to be studied, this research belongs to a type of normative legal research that utilizes a sociological juridical approach by taking primary data through a procession of interviews and processing primary, tertiary and secondary legal materials for secondary data collection.

From this research, a series of conclusions can be drawn that the formation of the New Autonomous Region of North Kalimantan Province based on Government Regulation Number 78 concerning Procedures for the Formation, Abolition and Merger of Regions is in accordance with the procedures determined from a normative perspective according to administrative, technical and regional physical requirements . Even though in its implementation there are still obstacles as well as obstacles, the existence of North Kalimantan Province can begin when Law No. 20 of 2012 concerning the Establishment of North Kalimantan Province, which also determines Tanjung Selor (Bulungan) as the capital of North Kalimantan Province. It does not stop with the DOB DOB which is valid to become a law, the objective of establishing a new autonomous region must still be carried out. Efforts in improving public services, efforts to accelerate and equalize development, hone regional potential, develop self-reliance (no longer depending on the central government), and increase various sectors carried out to achieve the welfare of the local community.

Keywords: *Establishment of a New Autonomous Region (DOB), Public Services, North Kalimantan Province*¹

¹ <https://translate.google.com/> (diakses pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 09.41)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu tempat yang berada di muka bumi dengan jumlah pulau yang begitu banyak. Tidak hanya jumlah pulaunya yang berlimpah, akan tetapi keindahan dari pulau-pulau yang ada di Indonesia juga telah mendunia. Sudah seharusnya fenomena di atas mengingatkan kita pada firman Allah dalam surah Az-zariyat ayat 48, Allah Berfirman:

وَالْأَرْضَ قَرَشْنًا فَغَنَمَ الْمُهْذُونَ

Yang Artinya: “ Dan Bumi itu Kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami)

Demikianlah Allah mengatur penciptaan bumi, menghamparkannya dengan sebaik mungkin. Banyaknya pulau di Indonesia, menyebabkan pemerintah pusat harus membuat kebijakan dengan membentuk suatu pemerintahan yang mampu mengontrol langsung daerah-daerah yang jauh dari jangkauan. Mengingat bahwa sebuah negara yang memiliki banyak daerah sangat berpotensi untuk terpecah-belah apabila tidak dikelola dengan baik dan bijak. Sehingga kita semua menginginkan negeri yang aman dan damai, jauh dari permusuhan, kebencian antar ras, etnis atau agama, dan terutama kecemburuan sosial antara daerah dan pusat. Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 126 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ
قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Yang artinya: “Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini,

negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali".²

Pemekaran wilayah adalah tahapan memecah wilayah yang dapat berupa sebuah provinsi atau wilayah kabupaten dan kota sehingga menjadi beberapa bagian. Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 6 ayat (1) dan (2), dijelaskan bahwa sebuah daerah yang tidak mampu menjalankan otonomi daerahnya memiliki opsi untuk dihapus dan digabung dengan daerah lain. Gencarnya praktik pemekaran daerah yang terjadi di negara ini, seyogyanya ditetapkan aturan terkait syarat atau kriteria dalam pembentukan daerah sehingga dapat dijadikan pertimbangan utama ketika hendak membentuk dan memekarkan daerah.

Awal mula pemekaran wilayah yakni dengan tujuan peningkatan kesejahteraan penduduk yang dijalankan dengan pelayanan publik dengan terobosan lebih baik. Tidak hanya itu, secara tidak langsung sistem birokrasi dapat diperkecil sehingga meluaskan penduduk untuk menyampaikan aspirasinya. Hubungan yang serasi antara pusat dan daerah diharapkan mampu mengacu penduduk untuk berkontribusi dalam percepatan pembangunan dan pengoptimalan potensi daerah.

Adapun alasan yang menjadi pertimbangan diperlukannya penyelenggaraan pemekaran daerah, sebagai berikut:

² <https://tafsirweb.com/562-quran-surat-al-baqarah-ayat-126.html> (Diakses pada tanggal 22/12/2020 pukul 10.03)

1. Alasan Pelayanan, daerah yang dimekarkan berpotensi untuk mencapai peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini dikarenakan sistem birokrasi yang lebih kecil dibandingkan ketika bersama dengan daerah induk.
2. Alasan Ekonomi, daerah yang dimekarkan digadang-gadang dapat melakukan sebuah reformasi perekonomian yang bersumber dari optimalnya pemanfaatan sumber daya daerah. Sehingga berbagai sektor lokal yang dahulu belum mendapat perhatian daerah induk, kini dapat menjadi fokus pengelolaan.
3. Alasan Keadilan, daerah yang dimekarkan diharapkan mampu berkontribusi dalam proses pemerataan pembangunan, tidak ada lagi alasan untuk terjadinya kecemburuan di sektor pembangunan.
4. Alasan Anggaran, daerah yang dimekarkan harus melakukan pembangunan dan hal ini dapat tercapai jika didukung oleh anggaran yang memadai.

Pembentukan daerah ditetapkan dengan Undang-undang, Undang-undang tersebut antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen serta perangkat daerah. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.³

³ Widada, S.H, *Mengenal Pemerintahan Daerah*, ipusnas (04Juni2020), hlm.2

Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah, perubahan tersebut dilakukan atas usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan dengan tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah yang telah di atur oleh peraturan pemerintah.

Sedangkan dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ditegaskan adanya tiga asas otonomi daerah, yaitu: Asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.⁴

Kemudian, apa tujuan pemberian otonomi baru yang luas kepada daerah?

Paling tidak meliputi dua hal sebagai berikut:

- a. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
- b. daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip
- c. demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem.⁵

Provinsi Kalimantan Utara merupakan Provinsi termuda di Indonesia, memiliki sejarah panjang sehingga dapat terbentuk. Setelah melewati perjuangan

⁴ Yudi Suparyanto, *Otonomi Daerah Dalam Kerangka NKRI*, Ipusnas (04 Juni 2020), h.

⁵ Tammi Prastowo, *Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Ipusnas (05/06/2020) h. 41

yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar sehingga resmi terbentuk sejak ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 November 2012 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.⁶

Sejalan dengan lahirnya provinsi baru ini, salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah penetapan Ibukota Provinsi. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan Kalimantan Utara menyatakan bahwa ibukota Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Disamping itu, sebuah ibu kota provinsi harus memiliki inovasi lebih tinggi serta berkembang lebih pesat daripada daerah-daerah lainnya, seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua daerah di Indonesia telah mengalami kemajuan dan mampu menaikkan jumlah pendapatan daerah dengan usaha mandiri provinsinya. Berangkat dari hal inilah, sudah selayaknya ibu kota provinsi bekerja lebih keras agar daerah-daerah di wilayahnya dapat segera merasakan peningkatan taraf hidup, pengoptimalan potensi sumber daya daerah serta kemampuan untuk bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Penetapan ibu kota di Tanjung Selor ternyata tidak semudah yang dibayangkan sebelumnya, beberapa pihak menyatakan ketidaksetujuannya. Hal ini tentu didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang mereka anggap patut untuk dikaji lebih mendalam. Sejalan dengan argumen bahwa Tanjung selor dianggap belum siap untuk menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Utara, muncullah

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Utara (Diakses pada tanggal 31 Agustus 2020, pukul 08.45)

spekulasi tentang sebuah kota di Kalimantan Utara yang digadang-gadang mampu menjadi kandidat kuat dalam persaingan merebut kursi ibu kota. Kota yang dimaksud adalah Tarakan, kota ini diklaim lebih siap menjadi ibu kota Kalimantan Utara dengan berbagai infrastruktur yang tersedia. “letak geografis sangat menguntungkan, pesawat sudah bisa mendarat, kita sudah punya bandara. Kita punya pelabuhan, dimana kapal-kapal besar bisa berlabuh,” ujar mantan wakil walikota Tarakan, Suhardjo.⁷

Berdasarkan uraian yang tertera pada latar belakang di atas dan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penentuan Ibukota Provinsi Klaimantan Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.**

B. Rumusan Masalah

Setelah penulis menjabarkan latar belakang dari penelitian yang akan dilakukan ini, maka ditariklah beberapa rumusan masalah yang akan menjadi batas tertentu dalam penelitian. Juga demi menjaga agar pembahasan tidak bertele-tele dan melebar, maka akan diberi batasan dengan sub inti sebagaimana yang tertuang berikut ini:

1. Apakah Proses Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi

⁷ Dikutip dari laman KBR Prime, Tarakan “Mengalah” Tak jadi Ibukota Kaltara, 17/04/2020 <https://kbr.id/12-2012/tarakan-mengalah-tak-jadi-ibukota-kalimantan-utara/59408.html>

**Kalimantan Utara Telah Sesuai Dengan Syarat-Syarat Yang Ditetapkan
Oleh Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 ?**

**2. Bagaimana Evaluasi Penentuan Tanjung Selor sebagai Ibukota
Provinsi Kalimantan Utara?**

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Berdasarkan Peninjauan pada judul yang telah diangkat serta latar belakang yang sangat mempengaruhi ketertarikan dalam melaksanakan penelitian ini, maka penulis akan berfokus pada:

1. Fokus Penelitian

Dengan mengambil judul Tinjauan Yuridis Terhadap Penentuan Ibukota Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, penelitian ini akan lebih terfokus pada mekanisme penetapan ibu kota Provinsi Kalimantan Utara dan juga evaluasi dari penentuan Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara menurut pasal 12 ayat (3) Peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.

2. Deskripsi Fokus

Deskripsi fokus merupakan pemaparan secara umum terhadap apa yang menjadi fokus penelitian dengan memberi konsentrasi lebih kepada fenomena yang hendak diteliti.

- a. Analisis adalah istilah yang telah banyak digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan, dan kata ini memang cukup familiar untuk didengar.

Pengertian analisis yaitu serangkaian proses pengkajian dan evaluasi informasi atau data yang bersifat kompleks yang kemudian akan dipecah menjadi bagian-bagian kecil sehingga memudahkan dalam mempelajari dan memahaminya.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah merupakan sebuah aturan hukum yang ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2007 yang sekaligus mencabut berlakunya PP. No. 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.
4. Penentuan Ibukota Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Penentuan ini dilakukan berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2012 pasal 7 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Kalimantan Utara adalah provinsi termuda di Indonesia, diresmikan melalui UU No. 20 tahun 2012 sekaligus menjadikan Kalimantan Utara sebagai Provinsi ke-34 di Indonesia. Proses terbentuknya provinsi ini tidaklah muda, masa perjuangan sekitar 12 tahun yang dilakukan para pengusung dan pendukung lahirnya Provinsi baru di wilayah utara menjadi pelajaran berharga yang akan terus tercatat dalam sejarah. Dikarenakan Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki begitu banyak wilayah, serta pembangunan yang terkesan berat sebelah sehingga menjadi alasan kuat mengapa Kalimantan Utara ingin memisahkan diri. Demi

percepatan pembangunan, Kalimantan Utara juga akan menjadi provinsi mandiri yang juga unggul meski tergolong masih muda.

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan sebuah daftar yang mengandung referensi, baik bersumber dari buku, papers, artikel, majalah, jurnal, disertasi, skripsi, dan lain sebagainya, yang sangat berguna melengkapi kekurangan data. Kajian pustaka juga mampu menjadi arah agar penulisan yang dilakukan memiliki titik fokus. Dibawah ini akan dicantumkan beberapa daftar kajian pustaka yang penulis kutip:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten PALI Menurut Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Daerah” skripsi ini membahas dengan baik mengenai daerah otonomi baru, apa saja syarat-syarat pemekaran daerah, serta bagaimana akibat hukum dari pemekaran daerah PALI.
2. Buku yang berjudul “Hukum Tata Ruang” Buku ini membahas dengan lugas tentang penduduk di bumi yang semakin bertambah sedangkan lahan yang tersedia tetap, tidak mengalami pertambahan. Penduduk pasti membutuhkan tempat untuk tinggal dan beraktivitas, sehingga menyebabkan ruang yang digunakan semakin banyak. Penduduk tidak hanya diam, mereka melakukan kegiatan seperti

pertanian, perikanan, perniagaan dan lain-lain. Untuk mencapai keselarasan ruang dibutuhkan aturan yang mengikat agar pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

3. Buku yang berjudul “Pengantar Ilmu Politik” Buku ini membahas mengenai pentingnya politik bagi masyarakat, bagaimana cara mengubah pola pikir tentang asumsi masyarakat tentang politik yang tidka baik dan kotor. Buku ini akan memberi gambaran, pengertian dan konsep-konsep dasar dalam ilmu politik.
4. Buku yang berjudul “Ketika Hukum Berbicara” buku ini menambah pengetahuan dan memperkaya literasi mengenai Hukum dan HAM di tengah kurangnya baac spesifik tentang penanganan dan perlindungan hukum dan HAM. Buku yang ringan dan mudah dibaca oleh berbagai kalangan, baik itu mahasiswa, politisi, jurnalis, akademisi, dan kalangan lain karena buku ini menawarkan solusi untuk penanganan dan pelindungan Hukum dan HAM.
5. Buku yang berjuudl “Mengenal Pemerintahan Daerah” Buku ini menerangkan sejarah pemerintahan daerah, pengertian pemerintahan daerah, hubungan pusat dan daerah serta ulasan mengenai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Buku ini direkomendasikan sebagai pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa, aparat pemerintahan, tenaga pengajar dan pemerhati

pemerintahan daerah. Buku yang diharapkan mampu meresap ke dalam sanubari pembaca karena disajikan secara apik dan berbeda.

6. Buku yang berjudul “Otonomi Daerah Dalam Kerangka NKRI” buku ini mencantumkan tentang pengertian, penjelasan dan manfaat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya itu, buku ini juga menyajikan tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah yang menjelaskan mengenai penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Buku ini sangat layak dibaca dan dijadikan referensi oleh mahasiswa khususnya yang ingin menulis tentang daerah.
7. Buku yang berjudul “Jejak Waktu Di Tapal Batas Pembuktian Eksistensi Provinsi Ke-34” buku yang berisi sejarah, perjuangan, dan dinamika terbentuk provinsi Kalimantan Utara. tidak hanya menyajikan sejarah yang mengesankan, perjuangan yang sarat akan nilai-nilai kesabaran mampu menjadi daya tarik tersendiri dari buku ini. perjalanan yang tidak mudah dan benar-benar panjang, hingga tiba pada dinamika yang cukup rumit. Buku ini memanjakan pembaca dengan sudut pandang yang tidak membosankan, khususnya sangat cocok dibaca oleh pemuda-pemudi Provinsi Kalimantan Utara. Menurut hemat penulis, data dan informasi yang tertera di dalam buku ini begitu lengkap sehingga memudahkan penulis dalam menemukan jawaban dari pertanyaan

yang selama ini dicari.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Setelah penulis menentukan rumusan masalah, fokus dan deskripsi penelitian, maka selanjutnya penulis akan menjabarkan beberapa tujuan penelitian, yakni:

1. Untuk mengetahui syarat dan proses pembentukan Provinsi Kalimantan Utara menjadi suatu daerah otonom baru yang ditinjau dari sudut pandang hukum.
2. Untuk mempelajari dan menjelaskan apa saja yang melatarbelakangi penentuan Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara.
3. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi dari penentuan Tanjung Selor sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan.
4. Sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana SI Hukum

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini ialah:

1. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan Utara, Khususnya Tanjung Selor.
2. Diharapkan agar penulisan skripsi ini dapat menjadi referensi dan literatur dalam penentuan lokasi ibukota Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Dan Fungsi Pemerintah Daerah

Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Muh. Yamin pernah mengatakan bahwa: “Negeri, Desa, dan segala persekutuan hukum aat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian bawah tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan Urusan Dalam, Pangrech Praja”. Pembagian daerah Indonesia atas daerah yang besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”⁸

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang”. Kemudian penjelasan mengenai pemerintahan daerah juga terdapat di dalam ayat (5) pasal yang sama, menjelaskan bahwa: “Pemerintahan daerah merupakan

⁸ M. Yamin, 1971, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Jilid I, Siguntang, hlm 100

daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tepatnya pada Pasal 10 dengan lugas memberikan penjabaran bahwa pemerintah daerah hanya menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah daerah juga mendapat kebebasan dalam merencanakan, mengatur, menjalankan, mengawasi dan melakukan berbagai kebijakan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Meskipun tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat, akan tetapi hubungan yang harmonis harus tetap terjalin antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Adapun hubungan hierarki tidak diberlakukan lagi, mengingat masing-masing sudah memiliki kewenangan dalam mengatur daerahnya.

Eksistensi Peraturan Daerah (*disingkat: perda*) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, adalah bagian tidak terpisahkan dari desentralisasi yang dikenal dengan otonomi daerah. Di dalamnya memiliki dua esensi kewenangan, yaitu “mengatur” dan “mengurus”. Kewenangan “mengatur” ini mengandung arti bahwa daerah berhak membuat keputusan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang kemudian (antara lain) diberi nama Peraturan Daerah.

Desentralisasi menuangkan prinsip-prinsip otonomi daerah, yaitu luas, nyata dan bertanggung jawab. Konsekuensi yuridis dari

desentralisasi kewenangan daerah, salah satunya adalah desentralisasi dalam hukum dan perundang-undangan. Terjadi pemencaran kewenangan (*spreiding van machten*) dalam membentuk peraturan perundang-undangan kepada daerah otonom, inilah yang salah satunya menghasilkan perda. Peraturan daerah dimaksud bukan sekadar peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di atasnya, akan tetapi lebih dari itu harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah (*zelfstandingheid*) dan aspirasi masyarakat lokal.

Kemandirian daerah otonom, berbentuk kewenangan membentuk perda tersebut oleh karena daerah otonom sebagai satuan pemerintahan mandiri memiliki wewenang atributif, lebih-lebih sebagai subjek hukum (*publiek rechtsperson, public legal entity*), selanjutnya berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang mengatur ini ada pada Pemerintah Daerah (pejabat administrasi negara) dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislatif di daerah. Peraturan Daerah dapat dilihat sebagai bentuk undang-undang yang bersifat lokal, sebagai produk legislatif (*legislative acts*), bedanya hanya pada lingkup teritorial berlakunya.”⁹

Setelah pembentukan otonomi daerah, tahap selanjutnya adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu dibutuhkan unsur

⁹ Dr. Jumadi, S.H., M.H., *Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-undangan Di Indonesia*, hal. 27-28 (dikutip tanggal 09 November 2020, pukul 19.55)

penyelenggara daerah yang diamanahkan kepada DPRD dan pemerintah daerah. Susunan yang ditetapkan yaitu pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan unsur perangkat daerah seperti sekretaris daerah, lembaga dinas, lembaga teknis. Kecamatan dan kelurahan.

Adapun fungsi dari pemerintah daerah dapat didefinisikan sebagai perangkat daerah yang menngemban tugas untuk mengatur, menjalankan serta menyelenggarakan urusan peemrintahan. Sedangkan berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2004, fungsi pemerintah daerah adalah:

- A) Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengurusan daerah yang menyangkut pemerintah belandaskan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- B) Melaksanakan otonomi dengan bebas, akan tetapi dibatasi pada urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Urusan pemerintahan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- C) Hubungan harus tetap terjalin antara peemrintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga sektor keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan suber daya alam dan sumber daya lainnya dapat dikelola dengan optimal.

2. Asas Pemerintahan Daerah

Undang Undang yang mengatur perihal pemerintahan daerah tercantum di dalam Undang Undang No.5 Tahun 1974, Undang Undang No.

22 Tahun 1999 dan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 yang notabene memasukkan tiga asas pemerintahan daerah, yakni: Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan. Akan tetapi jika menelaah lagi perubahan UUD 1945 tepatnya pada pasal 18 ayat (2), dengan tegas menerangkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

a. Asas Desentralisasi

Definisi desentralisasi menurut ahli memang terlihat berbeda dari segi diksinya akan tetapi makna yang ingin disampaikan memiliki persamaan. Berdasarkan pendapat Joenarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.¹⁰

Sedangkan berdasarkan pasal 1 butir (b) Undang Undang No. 5 Tahun 1974 ditegaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah setingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Dalam pasal 1 butir (e) Undang Undang No. 22 Tahun 1999 mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI. Pasal 1 ayat (7) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberi penjelasan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka

¹⁰ Joenarto, 1992. *Perkembangan Pemerintahan Lokal*. (Jakarta: Bina Aksara), hlm. 33

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Asas Dekonsentrasi

Menurut yang tertera di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tepatnya pasal 1 ayat (8) menyingkap pengertian dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Adapun tinjauan yang dapat dilakukan yakni dari sudut:

- a. Sudut wewenang, yang berisi pemberian wewenang pemerintah pusat kepada para pejabat di daerah yang selanjutnya mendapat amanah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang ada di daerah.
- b. Pembentuk pemerintah, dapat didefinisikan sebagai badan yang membentuk suatu pemerintahan yang lokal administrasi di daerah dan menjalankan tugas pusat di daerah.
- c. Pembagian wilayah, asas ini menghendaki pemecahan wilayah negara menjadi wilayah-wilayah administratif atau dapat pula berbentuk wilayah negara sebagai daerah pemerintah lokal administrative.

3. Asas Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan merupakan tugas yang dapat artikan sebagai keturutsertaan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang perintahnya diberikan kepada pemerintah desa oleh pemerintah daerah dengan tingkat

lebih atas serta wajib bertanggungjawab kepada yang memerintahkan tugas tersebut. Sedangkan definisi menurut pasal 1 butir (g) Undang Undang No. 22 Tahun 1999, tugas pembantuan ialah bentuk penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, kemudian daerah memberi tugas kepada desa untuk menjalankan suatu tugas yang juga dilengkapi dengan penganggaran sarana dan prasarana. Kemudian, wajib membuat laporan yang akan diserahkan kepada pihak yang telah memberi tugas.

C. Daerah Otonom

Daerah Otonom dapat diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu disertai kewenangan untuk melakukan sebuah pengaturan atau pengurusan melalui sektor pemerintahan dengan inisiatif sendiri demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat setempat. Daerah otonom mempunyai tiga elemen penyusun, yakni sebagai berikut:

- a. Elemen batas wilayah, suatu wilayah harus memiliki batasan sehingga dapat dengan mudah menetapkan kepastian hukum didalamnya. Batas ini sangat berguna apabila terdapat sengketa hukum yang menyangkut wilayah perbatasan daerah, kebijakan ini memudahkan untuk membedakan daerah satu dan lainnya.
- b. Elemen pemerintahan, yang berperan di dalam elemen pemerintahan di daerah adalah DPRD yang mengemban amanah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Elemen masyarakat, apakah arti sebuah daerah tanpa masyarakat didalamnya. Salah satu unsur krusial adalah masyarakat yang mengambil

peranan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diperkaya oleh tradisi, kebiasaan dan adat istiadat.

Setelah daerah otonom terbentuk, tujuan dari pembentukannya harus mendapat perhatian lebih, baik dari segi pembuatan aturan, hingga sampai pada pengawasan. Adapun tujuan dari daerah otonom yaitu: 1). meningkatkan sistem pelayanan umum, hal ini akan memudahkan masyarakat dalam urusan birokrasi dan kepentingan lainnya yang terkait dengan pelayanan umum. 2). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tujuan yang harus terlaksana. Sebab masyarakat merupakan unsur terpenting sekaligus muara dari pembentukan daerah otonom. 3). Meningkatkan daya saing daerah, setiap daerah memiliki potensi lokal yang berbeda sehingga pembentukan daerah otonom diharapkan mampu memicu peningkatan daya saing daerah.

D. Syarat Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Secara hukum syarat-syarat pemekaran suatu wilayah untuk menjadi kabupaten/kota atau provinsi tidak terlalu sulit. Pemekaran wilayah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah: pasal 4 ayat (3) “pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih”.¹¹

Sebelum melakukan pemekaran wilayah, hendaklah memenuhi beberapa syarat yang tertera pada pasal 5 ayat (1). Yang mengemukakan

¹¹ Skripsi pali

bahwa syarat yang diberikan kepada daerah yang akan dimekarkan sebagai berikut:

1. Syarat Administratif, untuk pemekaran provinsi dibutuhkan persetujuan DPRD Kabupaten/kota dan bupati/walikota yang selanjutnya akan menjadi bagian dari provinsi tersebut. Selanjutnya, persetujuan DPRD provinsi induk, gubernur serta rekomendasi yang diberikan langsung oleh menteri dalam negeri. sedangkan syarat administrative untuk pemekaran kabupaten/kota diperlukan persetujuan DPRD provinsi dan gubernur serta menteri dalam negeri.
2. Syarat Teknis, syarat ini mencakup sektor dasar yang bermanfaat untuk pembangunan daerah seperti potensi daerah, sosial daerah, sosial politik, sosial budaya, kependudukan, kemampuan ekonomi, luas daerah, pertahanan dan keamanan dan juga sektor lain yang dapat membantu percepatan pembangunan daerah.
3. Syarat Fisik, untuk pemekaran provinsi dibutuhkan sekurang-kurangnya lima (5) kabupaten atau kota yang siap menjadi cakupan wilayahnya. Untuk pemekaran kabupaten/kota diperlukan sekurang-kurangnya lima (5) kecamatan yang berkomitmen untuk menjadi bagian dari wilayah kabupaten/kota tersebut. Untuk pemekaran kota, syarat fisik yang harus dipenuhi adalah paling sedikit empat (4) kecamatan yang bersedia bergabung.

Akan tetapi, meskipun ketiga persyaratan diatas telah dimiliki, jangka waktu jalannya pemerintahan induk juga harus

dipertimbangkan. Sepuluh (10) merupakan jangka waktu pemerintahan induk untuk provinsi yang akan dimekarkan, tujuh (7) tahun untuk pemekaran kabupaten/kota dan lima (5) tahun sebagai syarat pemekaran kecamatan.

E. Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Penentuan Tanjung Selor Sebagai Ibukota

Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah menjadi payung hukum terhadap penentuan lokasi ibukota. Pada pasal 1 ayat (12) dijelaskan bahwa kajian daerah adalah kajian provinsi dan kabupaten/kota disusun oleh tim yang dibentuk oleh kepala daerah untuk menilai kelayakan pembentukan daerah secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor teknis yang dilengkapi dengan penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri.

Sedangkan dalam pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah yang sama diuraikan bahwa penetapan lokasi ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap:

a. Aspek Tata Ruang

Dalam penjelasan Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dikemukakan bahwa pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus sesuai

dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota, administrasi dan di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda.¹²

Apabila tidak dilakukan penyusunan rencana tata ruang yang baik, kemungkinan ketidakseimbangan laju pertumbuhan antar daerah dan merosotnya kualitas lingkungan hidup akan semakin meningkat. Mengingat bahwa penataan ruang di suatu daerah akan berpengaruh pada daerah lain, yang pada gilirannya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan, dalam perencanaan tata ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Perencanaan tata ruang sering dipandang sebagai titik signifikansi bagi pencapaian keberhasilan pembangunan. Dikatakan signifikansi karena dengan adanya suatu perencanaan akan membawa pada suatu pilihan berhasil atau tidaknya kegiatan dalam mencapai suatu tujuan pembangunan.

Rencana merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara yang mengupayakan terlaksananya

¹² Sodik Achmad, S.H., M.H., Ir. H. Ridwan Juniarso, M.Si., M.H., *Hukum Tata Ruang*, Ipusnas (06/09/2020) Hal.83, diakses pukul 14.05

suatu keadaan tertentu yang tertib (teratur), dan rencana semacam itu dapat dikaitkan dengan stelsel perizinan (misalnya suatu permohonan izin bangunan harus ditolak manakala hal ini bertentangan dengan rencana peruntukkan).

Diadakannya suatu perencanaan tata ruang bertujuan untuk dapat menyalurkan berbagai kegiatan pembangunan antarsektor dalam pembangunan daerah, sehingga dalam pemanfaatan ruang dan lahan dapat dilakukan seoptimal dan seefisien mungkin. Dan tujuan dilaksanakannya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk mengarahkan struktur dan lokasi pembangunan yang serasi dan seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga dapat tercapainya suatu pembangunan yang optimal. Selain hal tersebut, perencanaan tata ruang dapat mencegah kegiatan pembangunan yang akan merusak lingkungan hidup.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah provinsi, kabupaten/kota berhak melakukan suatu perencanaan tata ruang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh masing-masing pemerintah daerah masyarakatnya. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut masing- masing pemerintah daerah terlebih dahulu menyiapkan suatu rencana pembangunan yang dikenal dengan sebutan rencana tata ruang.

Hal ini dimaksudkan supaya dalam melaksanakan

pembangunan terlebih dahulu dilakukan suatu rencana guna menghindari permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Selain itu, melalui perencanaan tata ruang diarahkan agar pembangunan berjalan secara serasi dan seimbang dengan keadaan lingkungan dan kondisi masing-masing wilayahnya.

Ketika menyusun suatu rencana tata ruang, masing-masing daerah memiliki karakteristiknya yang spesifik. Hal ini disebabkan oleh letak dan kondisi masing-masing daerah berbeda. Sering terjadi perencanaan tata ruang suatu daerah tidak sinkron dengan daerah lainnya, terutama perencanaan tata ruang di daerah perbatasan. Ketidaksinkronan dalam melakukan rencana tata ruang di daerah perbatasan adalah konsekuensi dari dampak reformasi yang mendorong ke arah desentralisasi.

Dalam melakukan rencana tata ruang, antara kabupaten/kota hendaknya mengacu pada ketentuan rencana tata ruang daerah provinsi. Hal itu sudah dijelaskan dalam pasal 17 ayat (5) Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, yang menyatakan bahwa rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antarfungsi kegiatan. Artinya rencana tata ruang kabupaten/kota merupakan hasil dari penjabaran rencana tata ruang wilayah provinsi, yang meliputi pemanfaatan wilayah kabupaten/kota serta pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. Untuk dapat merealisasikan konsep otonomi daerah,

maka pemerintah daerah melakukan kegiatan pembangunan di berbagai sektor guna memenuhi berbagai kebutuhan.

b. Ketersediaan Fasilitas Dan Aksesibilitas

Fasilitas terbagi menjadi dua jenis, yakni fasilitas umum dan fasilitas sosial. Pengertian fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum. Contoh dari fasilitas umum (fasum) adalah seperti jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, fly over, under pass, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur busway, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya. Pengertian fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman. Contoh dari fasilitas sosial (fasos) adalah seperti puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, dan lain sebagainya.

Jika kita lihat dari pengertian yang ada memang sepertinya tidak jauh berbeda. Menurut kamus besar bahasa indonesia, fasum dan fasos memiliki arti yang berbeda. Fasilitas umum dan fasilitas sosial adalah milik bersama yang harus dijaga dan dirawat dengan baik agar bisa selalu dimanfaatkan secara maksimal untuk jangka panjang. Warga masyarakat dapat saling bahu-membahu untuk membangun dan atau memperbaiki fasum fasos sendiri jika memang

sangat diperlukan tanpa bergantung kepada pemerintah. Tanpa adanya fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai akan membuat hidup menjadi lebih sulit.

Fasilitas umum maupun fasilitas sosial buatan pemerintah yang dirusak orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan merugikan masyarakat secara umum. Fasum dan fasos yang disediakan oleh pemerintah dibiayai oleh dana yang sebagian besar didapat dari pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi dikumpulkan oleh pemerintah dari masyarakat, sehingga fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan milik masyarakat umum.¹³

Perancangan aksesibilitas tidak hanya terkait pada aksesibilitas fisik itu sendiri, tetapi juga terkait dengan mobilitas dan aksesibilitas sosial. UNESCAP (1995) mempublikasikan sebuah prinsip dalam perencanaan dan perancangan aksesibilitas sehingga sebuah fasilitas dapat benar-benar bekerja dengan baik bagi semua orang.

Prinsip mobilitas memberi jaminan kesempatan yang sama untuk melaksanakan aktivitas sehari-harinya di berbagai tempat. Secara sederhana, mobilitas merupakan kemampuan untuk bergerak atau digerakkan. Dalam konteks kota mobilitas dipengaruhi oleh

¹³ <http://www.organisasi.org/1970/01/arti-pengertian-fasilitas-umum-dan-fasilitas-sosial-perbedaan-fasum-fasos.html>, diakses pada 06 September 2020, pukul 14.37.

perkembangan suatu tempat atau pemekaran kota, yang mempersyaratkan pergerakan dan angkutan yang semakin cepat (Ikaputra, 2001). Semua bentuk media yang terkait dengan mobilitas ini harus tersedia dalam kondisi aksesibel, seperti jalur pedestrian (trotoar) dan kendaraan (mobil, bus, kereta api, taksi dan lainnya). Di banyak negara, trotoar dibuat datar atau selandai mungkin, aman dari lubang maupun *furniture* jalan lainnya serta dilengkapi dengan jalur pemandu.¹⁴

Dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan daerah terdapat keterangan mengenai sarana dan prasarana yang dapat menjadi fasilitas pemerintahan di suatu daerah adalah bangunan dan lahan untuk kantor kepala daerah, kantor DPRD, dan kantor perangkat daerah yang dapat digubakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Contoh lain mobilitas yang baik adalah ketersediaan berbagai pilihan transportasi yang nyaman, aman, dan dapat digunakan oleh siapapun. Kegagalan memenuhi prinsip mobilitas membuat keberadaan fasilitas publik yang aksesibel menjadi tidak optimal pemanfaatannya atau bahkan menjadi sia-sia karena tidak akan pernah dapat dipergunakan oleh semua orang. Begitu pula yang akan

¹⁴ Forestyana Sandra, Ikaputra, Kurniawan Harry, *Perancangan Aksesibilitas Untuk Fasilitas Publik*, Ipusnas (05/09/2020) Hal. 64, diakses pukul 14.21.

terjadi pada fasilitas publik yang jika prinsip tersebut tidak terlaksana maka fasilitas publik belum menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penggunaannya. Dalam skala kota informasi mengenai transportasi dan lingkungan yang dapat dipergunakan oleh semua orang juga harus dapat diakses dengan mudah, contohnya melalui peta maupun website layanan kota.

c. Kondisi Dan Letak Geografis

Kondisi merupakan suatu keadaan yang mencakup bagian internal maupun eksternal dari sebuah wilayah. Sedangkan letak geografis menurut Robert Kaplan, ia menjelaskan bahwa letak geografis pada suatu wilayah atau negara secara luas akan menjadi determinan yang mempengaruhi berbagai macam peristiwa yang lebih dibandingkan apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Dalam hal ini jelas bahwa yang dimaksud adalah letak geografis yang sangat menentukan masa depan pada suatu negara dalam menjalin hubungan internasional. Sedangkan menurut Meity Mudikawaty dkk (2018), Letak geografis meruoakan posisi keberadaan suatu wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi.¹⁵

Kondisi dan letak geografis merupakan unsur penting suatu

¹⁵ https://dosengeografi.com/letak-geografis/#Pengertian_Letak_Geografis_Menurut_Para_Ahli (Diakses pada tanggal 07 September 2020, pukul 09.44)

wilayah, dengan kondisi

dan letak geografis yang strategis suatu wilayah dapat berkembang dengan pesat di berbagai sektor. Adapun kondisi suatu daerah otonom baru menurut pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, disebutkan bahwa suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya mempunyai total nilai seluruh indikator faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah, dan faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu.²⁶

Selain memperhatikan kondisi wilayah, letak geografis untuk cakupan wilayah juga harus dipetakan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dalam pasal 9 ayat (1-2) yang berisi:

- a. Cakupan wilayah pembentukan provinsi digambarkan dalam peta wilayah calon provinsi.
- b. Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan daftar nama kabupaten/kota dan kecamatan yang menjadi cakupan calon provinsi serta garis batas wilayah calon provinsi dan nama wilayah kabupaten/kota di provinsi lain, nama wilayah laut atau wilayah negara tetangga yang

berbatasan langsung dengan calon provinsi.

Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah dimaksudkan dengan harapan daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan lokasi calon ibukota memang tidak mudah, hal ini dikarenakan lokasi ibukota harus menjadi tempat yang ideal, strategis dan aman. Sebagai pusat dari segala pemerintahan di sebuah provinsi, kondisi dan letak geografis calon ibukota harus stabil, tidak rawan terhadap bencana, mudah dijangkau dan sudah seharusnya menjadi lokasi yang lebih unggul di berbagai sektor dibandingkan daerah- daerah lain. Pertimbangan ini juga berlaku sama pada pemilihan Tanjung Selor sebagai ibukota daerah otonomi baru provinsi Kalimantan Utara, harus dilakukan penelitian lebih dalam terkait kondisi dan letak geografisnya.

d. Kependudukan

Suatu daerah otonom baru yang akan dibentuk pasti dituntut agar memenuhi unsur- unsur seperti wilayah, pemerintah, dan juga penduduk atau rakyat. Dalam pengertiannya, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Sedangkan kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perkembangan kependudukan akan menjadi kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Adapun kualitas penduduk merupakan kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.¹⁶

Tidak bisa dipungkiri, unsur penduduk memang penting dalam suatu daerah. Karena bagaimana mungkin sebuah daerah dapat terbentuk sedangkan penduduknya tidak ada, terlebih lagi tujuan negara hadir dan memberikan hak otonom pada daerah adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kebutuhan masyarakat setempat. Kependudukan menjadi indikator penetapan lokasi ibukota karena merupakan salah satu syarat teknis yang berlaku. Penduduk perlu

¹⁶ <https://kependudukan-ri.blogspot.com/p/pengertian-kependudukan-penduduk-adalah.html> (diakses pada tanggal 07 September 2020, pukul 13.45)

diketahui jumlahnya agar dapat menjadi barometer kesanggupan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

e. Sosial Ekonomi, Politik Dan Budaya

Nilai sosial adalah segala sesuatu yang dianggap berharga oleh masyarakat tentang sesuatu yang diharapkan, indah, dan benar keberadaan nilai bersifat abstrak dan ideal. Nilai sosial merupakan nilai yang dianut suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Untuk menentukan sesuatu itu dianggap baik atau buruk, pantas atau tidak pantas harus melalui proses menimbang. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masyarakat. Tak heran apabila antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain terdapat perbedaan tata nilai. Adapun ciri nilai sosial diantaranya sebagai berikut:¹⁷

- a) Disebarkan diantara warga masyarakat (bukan bawaan lahir)
- b) Merupakan konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat
- c) Terbentuk melalui sosialisasi (proses belajar).
- d) Bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan lain
- e) Merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia.
- f) Memiliki pengaruh yang berbeda. Dapat mempengaruhi

¹⁷ Yulianthi, S.S.T, Ilmu Sosial Budaya Dasar, Hal. 29-30, Ipusnas, (Diakses pada tanggal 08 September 2020, pukul 11.42)

pengembangan diri sosial.

- g) Memiliki pengaruh yang berbeda antarwarga masyarakat.
- h) Cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem nilai.

Selain ciri yang telah dijabarkan sebagaimana poin-poin di atas, nilai sosial juga memiliki fungsi bagi kehidupan manusia, diantaranya:

1. Dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan “harga” sosial dari suatu kelompok,
2. Dapat mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertindak laku.
3. Sebagai penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial. Nilai sosial dapat memotivasi seseorang untuk mewujudkan harapan sesuai dengan peranannya.
4. Sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok.
5. Sebagai alat pengawas perilaku manusia.

Sosial Ekonomi

Kegiatan ekonomi didefinisikan secara sederhana sebagai segala sesuatu kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kegiatan ekonomi ini tentu saja telah terjadi sejak awal dimana manusia-manusia masih sangat primitif dan terjadi di

seluruh penjuru bumi. Dalam perkembangan kegiatan perekonomian yang berjalan sudah pernah terjadi percobaan mendefinisikan ataupun pembuatan teori-teori ekonomi, yang dilakukan oleh para pemikir sejak lama.¹⁸

Bagi negara Indonesia banyak pertumbuhan ekonomi yang menjadi masalah, pembangunan tidak hanya pertumbuhan total, tetapi juga mencakup sasaran yang lebih luas, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan penciptaan struktur ekonomi yang seimbang adalah sangat diperlukan untuk berlangsungnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Ada tiga prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu wilayah, yaitu akumulasi capital, peningkatan sumber daya manusia dan adanya kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi menggunakan kemampuan dan keterampilan untuk meningkatkan produktifitas (Rahman, 1998). Perekonomian Indonesia akan menjadi kuat jika terjadi perubahan struktur ekonomi yang dicirikan oleh struktur industri ke arah nilai tambah yang tinggi dan hemat energi yang terkait dengan sumber daya alam yang tersedia.¹⁹

¹⁸ Salahudin A. Jaco, *Ekonomi Pasar Sosial Sejarah dan Latar Belakang*, (diakses pada tanggal

¹⁹ Dr. Syechalad Nur Muhammad, M.Si, *Perkebunan Dalam Kajian Sosial Ekonomi*, diakses pada tanggal 07 September 2020, pukul, 14.24)

Sosial ekonomi merupakan posisi atau kedudukan seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan terhadap jenis aktivitas ekonomi, pendidikan dan pendapatan. Sedangkan menurut Sumardi, Kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya keadaan sosial ekonomi seseorang dalam hidup bermasyarakat adalah tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, keadaan rumah tangga, tempat tinggal, kepemilikan kekayaan, jabatan dalam organisasi dan aktivitas ekonomi.²⁰

Adapun konsep kesatuan ekonomi yang menjadikan kekayaan yang ada di wilayah Indonesia adalah milik bersama bangsa Indonesia. Dengan demikian, suatu daerah tidak boleh memonopoli kekayaan alam yang dimilikinya. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah agar tidak terjadi ketimpangan.

Setelah membahas mengenai sosial ekonomi, selanjutnya penulis akan menjabarkan berbagai hal terkait dengan sosial politik.

²⁰ <https://www.gurupendidikan.co.id/kehidupan-sosial-ekonomi/>
(diakses pada tanggal 07/09/2020, pukul 14.15)

Sosial ekonomi tidak akan berjalan dengan mudah jika tidak didukung oleh sosial politik, bukan rahasia lagi bahwa memang benar politik akan sangat dibutuhkan di berbagai sektor kehidupan, salah satunya sosial ekonomi.

Kita juga jangan amnesia pada trauma mendalam yang terjadi pada manajemen ekonomi di era orde baru yang sangat menumbuhkembangkan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Akibatnya aspek pemerataan terlupakan karena “kode pembangunan” hanya dinikmati oleh kroni-kroni penguasa saja. Untuk mengamankan manajemen ekonomi seperti ini, maka kran-kran demokratisasi tidak dibuka. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) banyak terjadi; kebebasan berpendapat, kebebasan pers dibungkam sehingga orang tidak bisa menkritisi kebijakan pemerintah. Siapa yang mencoba mengkritik akan “digebuk”, karena dianggap mengganggu stabilitas nasional. Untuk menjaga pola ini, maka Security proach menjadi andalan pemerintah dengan militer/polisi sebagai “algojanya”.²¹

Tidak bisa dipungkiri bahwa memang perekonomian di Indonesia seringkali mengalami kekacauan, baik karena faktor internal maupun eksternal. Carut-marut di bidang ekonomi seakan-akan menambah beban yang harus dipikul rakyat, harga kebutuhan

²¹ Dr. Fadli Andi Natsif, SH. M.H., *Ketika Hukum Berbicara*, Prenadamedia Grup, (Dikutip Pada Tanggal 11 November 2020, Pukul 06.11)

pokok yang tidak stabil, korupsi yang terjadi dimana-mana, baik instansi “teri” maupun kelas “kakap”, semua menjadi unsur-unsur yang tak terpisahkan di negara ini. sehingga kedepannya penulis mendambakan perekonomian di Indonesia yang jauh dari kekacauan, lebih berkembang dan terhindar dari segala jenis “Virus-virus Berdasi”.

Sosial Politik

Kata politik mungkin sudah sering kita dengar atau mungkin kita justru sudah mengenalnya dari berbagai sumber, seperti media massa, seminar, *talk show*, dan sumber- sumber lainnya. Banyak pandangan di masyarakat terkait dengan makna dan keberadaan politik saat ini, ada yang menganggap politik itu buruk sebagai suatu hal yang positif, jika politik terkait dengan upaya untuk mewujudkan kebaikan bersama. Akan tetapi, ada pula masyarakat yang menganggap politik itu buruk atau negatif, sikap ini muncul ketika masyarakat melihat tujuan dan perilaku sebagian actor politik yang hanya mencari dan mempertahankan kekuasaan tanpa memperhatikan kepentingan rakyatnya.²²

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan anatara berbagai definisi yang berbeda

²² Dr. Djuyandi Yusa, SIP., M.Si., *Pengantar Ilmu Politik*, Hal. 1, Ipusnas, Diakses pada Tanggal

mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Sedangkan menurut Aristoteles dalam teori klasiknya, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.²³

Bahasa politik punya kekhasan karena lahir dari Rahim berbeda. Bahasa apolitik lahir dari masyarakat terpelajar yang sedang berupaya memperoleh kekuasaan. Tujuan bahasa apolitik tidak sekedar menyampaikan pesan, melainkan menggerakkan publik untuk mengambil keputusan. Keberhasilan Bahasa politik tidak dapat diukur begitu saja saat tuturan selesai dituturkan, tetapi harus idendapkan, bersifat akumulatif, dan melalui proses reflektif yang panjang. Sedangkan menurut Budiyo (2008), bahasa politik, di era elektoral yang baik perlu memenuhi tiga syarat, yakni informatif, partisipatif dan menggerakkan.

Syarat pertama perlu dipenuhi supaya konsistuen bisa memahami pesan yang disampaikan. Syarat kedua perlu dipenuhi supaya konsituen tidak ditempatkan sebagai objek, melainkan juga pelaku. Adapun syarat ketiga perlu dipenuhi Karen apolitik berkaitan dengan tindakan. Bahasa apolitik didesain untuk mendorong dan memotivasi pendengar melakukan tindakan politik yang sesuai

²³ <https://afhalrizqi.wordpress.com/2011/03/08/sosial-dan-politik/>
(diakses pada tanggal 07
September 2020, pukul 14.48)

dengan keinginan aktor politik.²⁴

Setiap wilayah di Indonesia merupakan kesatuan politik. Seluruh wilayah Indonesia beserta isi kekayaannya merupakan kesatuan tempat untuk hidup, rakyat Indonesia berhak membangun kehidupannya di seluruh wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki rasa senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air.

Bangsa Indonesia juga memiliki tekad sama untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Hal ini lahir dari adanya keyakinan bahwa kehidupan yang adil dan makmur akan dinikmati oleh semua rakyat Indonesia. Meski Indonesia terdiri dari banyaknya perbedaan, namun tidak menjadikan Indonesia terpecah-belah.²⁵

Sosial Budaya

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat (2002) adalah seluruh kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkannya dengan belajar dan semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Asalkan sesuatu yang dilakukan manusia memerlukan belajar maka hal ini bisa dikategorikan sebagai budaya. Selain itu, Koentjaraningrat (2020) mengemukakan

²⁴ Surahmat, Rokhman Fatur, *Politik Bahasa Penguasa*, hal. 137-138, Ipusnas, Diakses Pada Tanggal 08 September 2020, pukul 10.41.

²⁵ Tammi Prastowo, *Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Ipusnas (05/06/2020) h.45

beberapa unsur kebudayaan yang terdiri dari: Sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, Bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup dan sistem teknologi dan peralatan. Sedangkan menurut Taylor dalam bukunya *Primitive Culture*, memberikan definisi kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan dan kemampuan kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan lain serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat.²⁶

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki beragam budaya dan adat-istiadat yang berbeda. Keberagaman dan kemajemukan dalam masyarakat selalu membawa perubahan dan perkembangan atau dinamika sehingga masyarakat menjadi dinamis. Kemajemukan dalam masyarakat dibedakan ke dalam dua hal yang saling berkaitan, yaitu kemajemukan sosial dan kemajemukan budaya.

Kemajemukan sosial, berkaitan dengan relasi antar orang atau antar kelompok dalam masyarakat. Misalnya: perbedaan jenis kelamin, asal usul keluarga atau kesukuan, perbedaan ideology atau wawasan berpikir, perbedaan kepemilikan barang-barang atau pendapatan ekonomi. Sedangkan kemajemukan budaya, berkaitan

²⁶ Yulianthi, S.S.T, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Hal. 1-2, Ipsnas, Diakses pada tanggal 08 September 2020, pukul 10.21.

dengan kebiasaan-kebiasaan dalam menjalani hidup. Misalnya: cara memandang dan menyelesaikan persoalan, cara beribadah, perbedaan dalam menerapkan pola pengelolaan keluarga; atau singkatnya dapat disebutkan bagaimana seseorang memandang dunia, masyarakat dan kehidupan di dalamnya.

Keberagaman dan kemajemukan merupakan kenyataan sekaligus keniscayaan dalam kehidupan masyarakat. Keragaman merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan di masa silam, kini dan di waktu-waktu mendatang sebagai fakta, keragaman sering disikapi secara berbeda. Di satu sisi diterima sebagai fakta yang dapat memperkaya kehidupan bersama, tetapi di sisi lain dianggap sebagai faktor penyulit. Kemajemukan bisa mendatangkan manfaat yang besar namun bisa juga menjadi pemicu konflik yang dapat merugikan masyarakat sendiri jika tidak dikelola dengan baik.²⁷

Kesatuan sosial budaya benar-benar diperlukan dalam situasi seperti ini, perbedaan suku dan budaya tidak menjadi alasan untuk memicu terjadinya perpecahan. Keanekaragaman etnis masyarakat Indonesia adalah satu kesatuan, budaya Indonesia pada hakikatnya satu, corak dan ragamnya saja yang berbeda. Indonesia patut bersyukur karena para pendiri bangsa menyadari arti penting persatuan. Sumpah pemuda dikenang sebagai tonggak persatuan yang mempunyai hak dan kewajiban sama untuk membela bangsa dan negara.

Perubahan sosial-budaya memang merupakan proses yang lebih

²⁷ Tammi Prastowo, *Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Ipusnas (05/06/2020) h.46-49

bersifat alami daripada perubahan yang dialami oleh institusi hukum, apalagi berbicara mengenai hukum modern. Hukum modern memiliki sifat buatan manusia dan teknologis yang sangat kuat dan dikenal dengan hukum perundang-undangan. Untuk itu hukum memang mempengaruhi kehidupan sosial budaya, tetapi pada waktu yang sama hukum juga dibentuk oleh kondisi sosial budaya tersebut. Maka sering dikatakan bahwa hukum berakar pada “*a peculiar form of social life*” dan bentuk kehidupan sosial yang unik tersebut tidak lain adalah karakteristik sosial-budaya suatu bangsa itu sendiri. Hanya saja hukum modern seperti yang diterapkan di Indonesia sekarang bukan merupakan produk sosial-budaya Indonesia sendiri, melainkan suatu institusi yang dipaksakan dari luar (*imposed from outside*). Kata “hukum” dan “hakim” misalnya berasal dari akar kata “hak” yang juga tidak berasal dari Indonesia, melainkan diimpor dari luar. Indonesia secara formal memang menerima dan menggunakan hukum modern, tetapi tidak sepenuhnya secara kultural. Hukum modern dalam hal ini disebut “Hukum Nasional” tidak tumbuh dan dikembangkan dari dalam ruang sosial-kultural Indonesia yang agamis (sarat dengan nilai-nilai spiritualitas).²⁸

²⁸ Ahkam Jayadi SH., M.H., *Membuka Tabir Kesadaran Hukum*, Jurisprudentie Volume 4 Nomor 2 Desember 2017, Hal. 12 (dikutip Tanggal 09 November Pukul 19.31)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari beberapa alternatif jenis penelitian yang disuguhkan, maka penulis menentukan jenis penelitian yang akan dilakukan yakni penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.²⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan akan menuntut penulis untuk lebih banyak mengambil informasi, data dan juga bahan-bahan penelitian langsung ke lapangan. Hal tersebut harus dilakukan agar menemukan segala sesuatu yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini, dengan pertimbangan diatas, maka penulis telah menentukan bahwa lokasi penelitian akan berlangsung di kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Kantor BAPPEDA Kalimantan Utara. Akan tetapi lokasi penelitian dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kondisi dari para informan.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kalimantan Utara tepatnya di Tanjung Selor, karena lokasi cukup mudah untuk dijangkau dengan menggunakan kapal kecil untuk menyebrang ke lokasi tersebut. Tidak hanya itu, ketika berada di

²⁹ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> (Diakses pada tanggal 30 Agustus 2020, pukul 11.45)

Tanjung Selor penulis akan lebih mudah menemukan data dan informasi terkait judul ini serta dapat langsung meninjau lapangan dan membuktikan sendiri bagaimana implementasi yang ada disana. Sejauh ini diketahui beberapa kriteria lokasi ibukota belum dipenuhi oleh Tanjung Selor.

B. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian haruslah memiliki pendekatan penelitian, agar memudahkan penulis untuk fokus dan lebih detail di dalam merumuskan hasil penelitian. Pada penelitian ini penulis akan menentukan pendekatan penelitian yakni yuridis sosiologis, sebuah penelitian hukum yang diambil dari data primer melalui proses wawancara dan data sekunder yang berasal dari pengolahan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pendekatan yuridis bermanfaat untuk menganalisa aturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Penulis akan mengungkap masalah hukum yang terjadi dengan menggunakan ketentuan normatif.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian terbagi atas dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Kedua jenis sumber data ini sangat dibutuhkan agar penulis dapat menemukan penelitian yang lebih akurat, tepat dan lebih spesifik.

1. Data pertama yang akan kita bahas adalah data primer atau data dasar (*primary data or basic data*) data seperti ini dapat diperoleh dengan teknik langsung dari sumber pertama, yakni dapat dilakukan wawancara (*interview*) dan responden secara tatap muka atau via online terkait langsung dengan

judul yang telah diangkat ini.

2. Data yang selanjutnya adalah data sekunder (*secondary data*) merupakan data yang dapat diperoleh melalui penelusuran buku-buku terkait, jurnal yang bersangkutan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil penelitian terdahulu.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian lapangan menjadi salah satu metode penelitian yang berfokus pada cara pengumpulan data dengan melakukan observasi dan juga wawancara dengan pihak terkait agar mendapat penemuan baru ataupun hasil penelitian yang diharapkan.

Menurut Roice Singleton (1998:308), penelitian lapangan berasal dari dua tradisi yang terkait yakni antropologi dan sosiologi, dimana etnografi merupakan studi antropologi dan etnometodologi merupakan studi sosiologi.³⁰

Selanjutnya, penulis akan menjelaskan metode apa yang akan digunakan dalam proses tatkala mengumpulkan data:

1. Observasi, penulis akan melakukan pengamatan langsung di lapangan terkait dengan objek penelitian agar mendapatkan penemuan dan juga beberapa informasi yang mendukung.
2. Wawancara atau interview, penulis juga memilih metode wawancara karena hal ini dirasa sangat efektif untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Akan banyak jawaban-jawaban tak terduga yang akan timbul, sehingga penulis dapat menarik berbagai kesimpulan yang selanjutnya akan diolah dengan sebaik mungkin dan kemudian akan

30

[https://www.academia.edu/24308046/PENELITIAN_LAPANGAN_FIELD_RESE
ARCH_PADA_MET
ODE_KUALITATIF](https://www.academia.edu/24308046/PENELITIAN_LAPANGAN_FIELD_RESEARCH_PADA_METODE_KUALITATIF) (Diakses pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 11.00)

memberi titik terang terhadap masalah yang diteliti.

3. Kepustakaan, selain observasi, dan juga wawancara, penelitian ini juga mengharuskan penulis untuk menemukan data dan literatur dengan membaca buku, mengkaji jurnal, hasil penelitian terdahulu dan juga menganalisis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
4. Responden, cara pengumpulan data melalui responden dianggap dapat memberikan berbagai keterangan terkait penelitian. Responden yang dipilih merupakan masyarakat yang bersedia menyampaikan aspirasinya agar perwujudan kesejahteraan masyarakat dapat segera terlaksana.

E. Instrumen penelitian

Ketika hendak melakukan penelitian, penulis harus memiliki bekal-bekal yang dapat membantu untuk menjadikan hasil penelitian lebih berkualitas dan jelas. Alat bantu tersebut dikenal dengan nama instrumen penelitian.

Pemilihan instrumen penelitian harus disesuaikan dengan metode penelitian yang akan digunakan. Adapun instrumen penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pena dan Buku Catatan

Alat bantu ini penulis butuhkan guna mencatat hal-hal penting yang mendesak atau keterbatasan penulis menggunakan alat bantu lainnya.

2. Handphone

Alat bantu selanjutnya adalah handphone yang menurut hemat penulis merupakan alat bantu yang tidak boleh tidak ada tatkala melangsungkan penelitian. Handphone yang multifungsi diharapkan dapat meringankan pekerjaan penulis. Handphone dapat digunakan

sebagai alat rekam, alat dokumentasi, mencari alamat informan melalui aplikasi maps, dan lain sebagainya.

3. Observasi

Sebelum memulai penelitian, penulis harus melakukan serangkaian kegiatan yakni hadir langsung di lokasi penelitian, demi menemukan berbagai fakta, data yang sesuai dengan lapangan penelitian.

4. Peneliti

Instrumen penelitian yang terakhir adalah peneliti. Keberadaan peneliti sangatlah Penting, dimana ada begitu banyak peran yang akan diletakkan di atas bahu peneliti. Dengan hasil penelitian yang kelak didapat oleh peneliti, fakta baru serta ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan judul penelitian akan terus berkembang pesat.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Di dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengolahan data yang bersifat kualitatif. Menurut pendapat dari Denzin & Lincoln, penelitian kualitatif adalah suatu komitmen terhadap pandangan naturalistik-pendekatan interpretatif terhadap pokok persoalan studi dan suatu kritik yang berkelanjutan terhadap politik dan metode positivisme. Sedangkan menurut pendapat dari Saryono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.³¹

Selanjutnya, data yang diperoleh dari lapangan ataupun kepustakaan akan dianalisa berdasarkan sistem deskriptif kualitatif. Proses ini dilakukan dengan mengubah data yang telah dikumpulkan

³¹ <https://pakdosen.pengajar.co.id/penelitian-kualitatif/#ftoc-heading-4> (Diakses pada tanggal 08 september 2020, pukul 21.52)

ke dalam bentuk penjabaran logis dan sistematis, kemudian dilakukan serangkaian tahapan analisa sehingga menemukan kejelasan untuk penyelesaian masalah. Setelah itu, kesimpulan secara deduktif akan merujuk dari sifat umum ke sifat khusus.



BAB IV

HASIL DAN PENELITIAN

A. Gambaran Geografis Provinsi Kalimantan Utara

Kalimantan Utara merupakan pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah Barat Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan terkenal dengan julukan “Pulau Seribu Sungai” karena banyaknya sungai yang mengalir pulau ini. Pulau Kalimantan bagian utara berbatasan langsung dengan Serawak, Sabah dan Brunai. Yang mana dulunya adalah bagian dari wilayah Berau.³²

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas 75.467,70 km² dengan jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 729.128. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu di sebelah utara dan barat membentang perbatasan dengan Malaysia Timur. Di sebelah timur berbatasan dengan laut Sulawesi, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kalimantan Timur. Kalimantan Utara dibagi menjadi 5 wilayah administrasi yang terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kota. Wilayah administrasi tersebut adalah Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan. Provinsi ini juga memiliki 53 kecamatan, 35 kelurahan dan 447 desa. Dari ke-lima wilayah tersebut, Kalimantan Utara telah menetapkan Kabupaten Bulungan, tepatnya di kecamatan Tanjung Selor sebagai ibukota provinsinya.³³ Berstatus sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan memiliki luas kurang lebih 13.181,92 km² dan terdiri dari 10 Kecamatan, 81 desa dan 6 Kelurahan.³⁴

Sedangkan Tanjung Selor, merupakan salah satu daerah yang berada di provinsi Kalimantan Utara, memiliki luas wilayah kurang lebih

³² Litbang Bappeda, *Jejak Waktu Di Tapal Batas Pembuktian Eksistensi Provinsi Ke-34*, hal. 1 (dikutip tanggal 16 November 2020, Pukul 08.00)

³³ <https://kaltaraprov.go.id/profil/geografis> (Diakses Pada tanggal 17 November 2020, Pukul 08.05)

³⁴ <https://bulungan.go.id/v5/index.php/bulungan/letak-dan-batas-wilayah> (Diakses pada tanggal 31 Agustus 2020, pukul 08.56)

1.277.81 km² yang di sebelah Timur berbatasan dengan Tanjung Palas Timur, di sebelah selatan berbatasan dengan berau, Di sebelah utara berbatasan dengan Tanjung Palas dan Tanjung Palas Tengah, dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Tanjung Palas. Kondisi geografis dan topografis dari kecamatan Tanjung Selor ini adalah sebagian besar merupakan tanah datar dan sungai-sungai.

Wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Tanjung Selor membawahi 3 (tiga) wilayah pemerintahan Kelurahan, Yaitu: Tanjung Selor Hulu, Tanjung Selor Hilir dan Tanjung Selor Timur. Membawahi pula 6 (enam) desa meliputi: Jelarai Selor, Gunung Seriang, Bumi Rahayu, Gunung Sari, Apung dan Tengkapak.

Kecamatan Tanjung Selor adalah ibukota kabupaten dan merupakan pusat pemerintahan. penduduknya sangat beragam terdiri dari berbagai suku, seperti tidung, bulungan, Dayak, bugis, jawa dan suku-suku pendatang lainnya. Tidakhanya itu, penduduk Tanjung Selor juga memeluk keyakinan yang berbeda-beda, seperti agama islam, Kristen, Buddha dan Hindu. Dengan keragaman suku dan agama penduduk setempat membuat budayanyapun juga cukup beragam. Namun dengan keragaman itulah membuat dinamika budaya pun mengalami proses akulturasi dan saling menghormati antar budaya dan masyarakat.

Jumlah penduduk yang mendiami kecamatan Tanjung Selor berjumlah 30.486 Jiwa, dengan 6.555 kartu keluarga, meliputi 16.139 jiwa laki-laki dan perempuan 14.347 jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai 23.86 jiwa/km² dan tingkat rata-rata penduduk/keluarga 4.65 jiwa.³⁵

B. Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007

Menurut yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 pembentukan Provinsi Kalimantan Utara diwajibkan memenuhi tiga

³⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Selor,_Bulungan (diakses pada 23/12/2020, pukul 09.59)

syarat, yaitu Syarat Administratif, Syarat Teknis dan Syarat Fisik Kewilayahan. Berikut penjelasannya:

1. Syarat Administratif pembentukan daerah Provinsi

- a. Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil rapat paripurna;
- b. Keputusan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan bersama bupati/walikota wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi;
- c. Keputusan DPRD provinsi induk tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil rapat paripurna;
- d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon provinsi; dan
- e. Rekomendasi Menteri.

Keputusan yang diambil akan mencakup perihal:

- a. Persetujuan nama calon provinsi
- b. Persetujuan lokasi calon provinsi
- c. Persetujuan pelepasan kabupaten/kota menjadi cakupan wilayah calon provinsi
- d. Persetujuan pemberian hibah untuk calon provinsi
- e. Persetujuan untuk memberikan dukungan dana untuk pemilihan umum gubernur pertama kali pasca terbentuknya DOB
- f. Persetujuan penyerahan sarana dan prasarana perkantoran untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah DOB, dari provinsi Induk kepada provinsi baru. Aset lainnya yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan dengan ganti rugi atau tukar-menukar
- g. Penetapan lokasi ibukota provinsi baru apabila lokasi ibukota provinsi induk menjadi cakupan wilayah provinsi yang akan dibentuk

2. Syarat Teknis

a. Kajian daerah

Menurut yang tertera di dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007, syarat teknis ditentukan berdasarkan hasil kajian daerah yang meliputi: kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan dan keamanan,

kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- b. Buku provinsi dalam angka terbitan terakhir untuk semua provinsi yang ada di wilayah provinsi induk
- c. RPJM provinsi
- d. Potensi masing-masing kabupaten/kota
- e. Monografi masing-masing kabupaten/kota

3. Syarat Fisik Kewilayahan

- a. Cakupan wilayah meliputi pembentukan provinsi minimal terdapat 5 kabupaten/kota
- b. Peta wilayah dilengkapi dengan daftar nama kabupaten/kota yang menjadi cakupan wilayah calon provinsi serta garis batas wilayah calon provinsi, nama wilayah provinsi, wilayah laut, atau wilayah negara tetangga yang berbatasan langsung dengan calon provinsi.
- c. Peta wilayah dibuat berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis (BAKOSURTANAL, Direktorat topografi TNI-AD untuk wilayah daratan, dinas Hidro Oseanografi TNI-AL untuk wilayah kepulauan)
- d. Peta wilayah provinsi dibuat sesuai dengan kaidah peta dasar nasional dengan skala 1:100.000 s/d 1:120.000 untuk kabupaten dan skala antara 1:50.000 untuk kota.

C. Pembentukan Ibukota Provinsi Kalimantan Utara

Penentuan calon ibukota Provinsi Kalimantan Utara menjadi bahasan sejalan dengan rencana pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. keempat kabupaten/kota di utara Kalimantan Timur (Malinau, Tarakan, Nunukan, Bulungan) memiliki peluang yang sama untuk menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Utara bahkan Berau juga menjadi salah satu alternatif sebagai

calon Ibukota Provinsi Kalimantan Utara meskipun telah menyatakan belum ingin bergabung di Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk membahas kelengkapan sebelum kelahiran Provinsi Kaltara, Gubernur Suwarana Abdul Fatah mengundang Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota se-wilayah utara pada rapat koordinasi hari Kamis tanggal 02 Februari 2006 bertempat di Kantor Gubernur Kalimantan Timur Jalan Gajah Mada No.02 Samarinda. Pertemuan itu dihadiri oleh H. Suwarana Abdul Fatah (Gubernur Kalimantan Timur), H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si (ketua komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur), Drs. H. Budiman Arifin (Bupati Bulungan), H. Hanafiah (a.n. Bupati Malinau), Drs. Yansen Tp, M.Si (a.n. Bupati Malinau), H. Thamrin Ad (wakil Walikota Tarakan), H.M Darwin Perajin (Ketuan DPRD Kabupaten Bulungan), Drs. Johny Laing Impang, M.Si (Ketua DPRD Kabupaten Malinau), dan H. Udin Hianggio (Ketua DPRD Kota Tarakan). Secara khusus rapat koordinasi itu membahas tentang penetapan nama provinsi dan kota yang akan dijadikan sebagai calon Ibukota Provinsi Kalimantan Utara.

Hasil dari pertemuan itu dituangkan dalam berita acara kesepakatan Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota Se-wilayah Utara Kalimantan Utara dengan keputusan sebagai berikut:

1. Nama Provinsi: Provinsi Kalimantan Utara disingkat Provinsi Kaltara;
2. Tim independen untuk mengkaji Ibukota Provinsi Kaltara ditunjuk oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan disepakati dari Universitas Mulawarman (UNMUL);
3. Hasil kajian tim independen UNMUL tentang ibukota disepakati menjadi Ibukota Provinsi Kaltara;
4. Selanjutnya, hasil kajian yang dimaksud ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten/Kota wilayah Utara;
5. Batas waktu pengkajian tim independen (UNMUL) selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan

kontrak kerja;

6. Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi itu, pada tanggal 14 februari 2006, Gubernur Kalimantan Timur H. Suwarna Abdul Fatah menyurati Rektor Universitas Mulawarman c/q Dekan Fispol UNMUL untuk melakukan kajian tentang letak calon Ibukota Provinsi Kalimantan Utara. Pihak UNMUL kemudian menindaklanjuti dengan membentuk Tim Kajian penentuan calon Ibukota Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari 20 orang dan diketuai oleh Drs. H. Masjaya, M.Si dengan narasumber Prof.

H. Sarosa Hamongpranoto S.H., M.Hum dan penanggungjawab Drs. DB. Paranoan, M.Si dan Prof. Dr. Adri Patton, M.Si.

Mengingat bahwa masalah pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan pemilihan calon ibukotanya menyita cukup banyak respon dan perhatian dari masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Utara, maka berbagai dukungan datang dari sebagian besar masyarakat baik dukungan yang bersifat perorangan, maupun dukungan yang berupa aspirasi dari masyarakat yang bersifat kelompok yang berasal dari organisasi kemasyarakatan maupun dari lembaga swadaya masyarakat, partai politik serta DPRD.³⁶

Provinsi Kalimantan Utara memiliki 4 kandidat kuat sebagai calon ibukota Provinsi, yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Pada pasal 12 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007, disebutkan tentang lokasi calon ibukota harus melalui kajian daerah. Adapun kajian daerah yang dilakukan tim independen UNMUL tentang studi kelayakan calon ibukota provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut:

Tabel 1 Variabel Tata Ruang Kota

³⁶ Litbang Bappeda, *Jejak Waktu Di Tapal Batas Pembuktian Eksistensi Provinsi Ke-34*, hal. 29-31 (dikutip tanggal 11 November 2020, Pukul 06.51)

NO	KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	BOBOT	SKOR	TOTAL
A. Ketersediaan lahan (Luas Wilayah Pembangunan)					
1	Bulungan (Tg. Selor)	1.277,81 Km2	15	3	45
2	Malinau (Malinau Kota)	474.92 Km2	15	1	15
3	Nunukan (Nunukan Kota)	1.596,77 Km2	15	4	60
4	Tarakan	657,33 Km2	15	2	90
B. Pusat Pelayanan (Pusat Perdagangan dan Jasa)					
1	Bulungan	9 buah	15	3	45
2	Malinau	2 buah	15	1	15
3	Nunukan	3 buah	15	2	30
4	Tarakan	10 buah	15	4	60

Sumber: Laporan Kajian UNMUL 2006

Tata Ruang Kota

Variabel Tata Ruang Kota ini dibagi dalam dua indikator, yang masing-masing memiliki satu sub indikator. Untuk sub indikator tentang luas wilayah pengembangan, Nunukan (Nunukan kota) memiliki 4 skor karena memiliki pengembangan wilayah paling luas yaitu 1.596,77 Km2. Sedangkan Bulungan (Tanjung Selor) memiliki skor 3 dengan luas wilayah 1.277,81 Km2, diikuti Kota Tarakan dengan skor 2 dengan luas wilayah 657,33 Km2 dan terakhir Malinau (Malinau kota) diberi skor 1 dengan luas wilayah 474,92 Km2.

Sedangkan untuk indikator pusat pelayanan dengan sub indikator pusat perdagangan dan jasa, Kota Tarakan memiliki skor 4 karena memiliki pusat pusat perdagangan dan jasa terbanyak yaitu 10 buah, kemudian diikuti oleh Bulungan dengan skor 3 yang memiliki 9 buah pusat perdagangan dan jasa, Nunukan dengan skor 2 karena hanya memiliki 3 buah pusat perdagangan dan jasa, dan terakhir Malinau yang memiliki pusat perdagangan dan jasa 2 buah dengan skor 1.

Tabel 2 Variabel Fasilitas Pelayanan

NO	KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	BOBOT	SKOR	TOTAL
A. Fasilitas Pendidikan (SMU Sederajat & PT)					
1	Bulungan	12 buah	10	2	20
2	Malinau	4 buah	10	1	10
3	Nunukan	13 buah	10	3	30
4	Tarakan	21 buah	10	4	40
B. Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit)					
1	Bulungan	1 buah	10	1,5	15
2	Malinau	1 buah	10	1,5	15
3	Nunukan	2 buah	10	3,5	35
4	Tarakan	2 buah	10	3,5	35
C. Perbankan (Bank umum & BPR)					
1	Bulungan	7 buah	10	2,5	25
2	Malinau	4 buah	10	1	10
3	Nunukan	7 buah	10	2,5	25
4	Tarakan	10 buah	10	4	40
D. Kantor Pemerintahan					
1	Bulungan	25 buah	10	2	20
2	Malinau	23 buah	10	1	10
3	Nunukan	28 buah	10	3	30
4	Tarakan	29 buah	10	4	40



Fasilitas Pelayanan

Variabel fasilitas dan pelayanan dibagi dalam empat indikator, yang masing- masing memiliki satu sub indikator. Untuk sub indikator tentang jumlah fasilitas sekolah SMU/ sederajat dan perguruan tinggi yang tersedia, Bulungan memiliki 12 sekolah diberi skor 2, sedangkan Malinau yang memiliki 13 sekolah diberi skor 3, Nunukan yang memiliki 13 sekolah diberi skor 3, sedangkan Tarakan yang memiliki 21 sekolah diberi skor 4.

Untuk sub indikator tentang keberadaan Rumah Sakit (golongan B dan C), Bulungan dan Malinau memiliki masing-masing satu rumah sakit sehingga sehingga diberi skor masing-masing 1,5. Sedangkan Tarakan dan Nunukan

masing-masing memiliki dua Rumah Sakit sehingga masing-masing diberi skor 3,5.

Untuk sub indikator tentang keberadaan Bank dan BPR, Tarakan dengan sepuluh buah Bank memiliki skor 4. Diikuti oleh Bulungan dan Nunukan tujuh Bank sehingga mendapat masing-masing skor 2,5 dan Malinau dengan empat Bank diberi skor 1.

Sedangkan untuk sub indikator keberadaan Kantor Pemerintah, Tarakan dengan 29 instansi diberi skor 4, diikuti oleh Nunukan dengan 25 instansi diberi skor 3, dan Bulungan dengan keberadaan 24 instansi diberi skor 2. Terakhir Malianu dengan 23 instansi diberi skor 1.

Tabel 3 Variabel Infrastruktur

NO	KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	BOBOT	SKOR	TOTAL
A. Jalan Provinsi					
1	Bulungan	134 Km	15	4	60
2	Malinau	76 Km	15	3	45
3	Nunukan	53 Km	15	2	30
4	Tarakan	-	15	1	15
B. Jalan Kabupaten					
1	Bulungan	856,37 Km	15	4	60
2	Malinau	389,00 Km	15	3	45
3	Nunukan	352,95 Km	15	2	30
4	Tarakan	148,50 Km	15	1	15
C. Terminal					
1	Bulungan	2 buah	15	4	60
2	Malinau	1 buah	15	2	30
3	Nunukan	1 buah	15	2	30
4	Tarakan	1 buah	15	2	30
D. Bandara (Panjang Lintasan)					
1	Bulungan	1200 meter	15	2,5	37,5
2	Malinau	1200 meter	15	2,5	37,5
3	Nunukan	900 meter	15	1	15
4	Tarakan	1850 meter	15	4	60
E. Pelabuhan					
1	Bulungan	2 buah	15	3	45

2	Malinau	1 buah	15	1,5	22,5
3	Nunukan	1 buah	15	1,5	22,5
4	Tarakan	5 buah	15	4	60

Sumber: Laporan Kajian UNMUL 2006

Variabel infrastruktur dibagi dalam lima indikator. Yang masing-masing memiliki beberapa sub indikator. Untuk sub indikator jalan provinsi, Bulungan memiliki jalan provinsi sepanjang 134 Km diberi skor 4, diikuti oleh Malinau dengan panjang 76 Km diberi skor 3. Sedangkan untuk Nunukan dengan panjang 53 Km diberi skor 2 dan karena Tarakan tidak memiliki jalan provinsi maka hanya diberi skor 1.

Untuk sub indikator jalan Kabupaten, di Bulungan terdapat 856,37 Km dan diberi skor 4, diikuti oleh Malinau dengan panjang jalan 389,00 Km dengan skor 3 dan Nunukan dengan 352,95 Km diberi skor 2. Sedangkan Tarakan dengan panjang jalan 148,50, diberi skor 1.

Untuk sub terminal, di Bulungan terdapat dua terminal (terminal dalam kota dan terminal antar kota), sehingga diberi skor 4, sedangkan di Malinau, Nunukan dan Tarakan masing-masing hanya memiliki satu terminal dalam kota, sehingga masing-masing diberi skor 2.

Untuk sub bandara, dinilai dari panjang landasan pacu. Bandara Juwata Tarakan memiliki panjang 1850 m, sehingga Tarakan diberi skor 4, diikuti oleh Bulungan dan Malinau dengan panjang 1200m dengan skor masing-masing 2,5 dan Nunukan dengan panjang 900 m diberi skor 1.

Sedangkan untuk sub indikator pelabuhan, dilihat dari banyaknya pelabuhan yang ada di tiap kabupaten/kota, baik pelabuhan laut maupun pelabuhan sungai. Tarakan memiliki 5 buah jembatan mendapatkan skor 4, diikuti oleh Bulungan yang

memiliki 2 buah jembatan diberi skor 3, sedangkan untuk Malinau dan Nunukan yang masing-masing memiliki 1 buah jembatan diberi skor 1,5.

Tabel 4 Variabel Perekonomian

NO	KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	BOBOT	SKOR	TOTAL
A. Pertumbuhan Ekonomi (Rata-rata) Migas dan Non migas					
1	Bulungan	3,53% / tahun	10	1	10
2	Malinau	5,06% / tahun	10	3	30
3	Nunukan	3,95 % / tahun	10	2	20
4	Tarakan	7,31 % / tahun	10	4	40
B. PDRB Perkapita (Pendapatan per Kapita) Rata-rata Migas dan Non Migas					
1	Bulungan	13.369.834,67	10	3	30
2	Malinau	9,23 Juta	10	1	10
3	Nunukan	11,40 Juta	10	2	20
4	Tarakan	15.566.684	10	4	40

Variabel faktor perekonomian dibagi dalam dua indikator yang masing-masing memiliki satu sub indikator. Untuk sub indikator tentang tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung secara rata-rata antar era pertumbuhan ekonomi dengan migas dan non migas untuk tahun 2004 Tarakan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebanyak 7,31% diberi skor 4, diikuti oleh Malinau dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06% diberi skor 3, dan Nunukan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,95% diberi skor 2, dan Bulungan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,53% diberi skor 1.

Sedangkan untuk sub indikator PDRB atau pendapatan perkapita rata-rata dengan migas dan non migas, Tarakan dengan pendapatan perkapita sebesar 15.566.684 diberi skor 4, diikuti oleh Bulungan sebesar 13.369.834,67 diberi skor 3. Sedangkan Nunukan sebesar 11,40 jt diberi skor 2, dan Malinau sebesar 9,23 jt diberi skor 1.

Tabel 5 Variabel Kependudukan

NO	KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	BOBOT	SKOR	TOTAL
A. Jumlah Penduduk					
1	Bulungan	98,310 Jiwa	10	2	20
2	Malinau	52,419 Jiwa	10	1	10
3	Nunukan	108,400 Jiwa	10	3	30
4	Tarakan	157,574 Jiwa	10	4	40
B. Tingkat Kepadatan Penduduk					
1	Bulungan	19,00 Jiwa/km ²	10	4	40
2	Malinau	38,58 Jiwa/km ²	10	2	20
3	Nunukan	29,48 Jiwa/km ²	10	3	30
4	Tarakan	157 Jiwa/km ²	10	1	10

Sumber: Laporan Kajian UNMUL 2006

Variabel kependudukan dibagi dalam dua indikator yang masing-masing memiliki satu sub indikator. Untuk sub indikator jumlah penduduk masing-masing daerah, Tarakan memiliki jumlah penduduk sebesar 157.574 jiwa diberi skor 4, diikuti oleh Nunukan (kota) sebanyak

108.400 jiwa diberi skor 3. Sedangkan Bulungan (Tanjung Selor) dengan jumlah penduduk sebesar 98.310 jiwa diberi skor 2 dan Malinau (kota) dengan jumlah penduduk sebesar 52.419 jiwa diberi skor 1.

Sedangkan untuk sub indikator tingkat kepadatan penduduk, Bulungan (Tanjung Selor) dengan tingkat kepadatan 5,46 jiwa per Km² diberi skor 4, diikuti oleh Nunukan (kota) dengan tingkat kepadatan 7,68 jiwa per Km² diberi skor 3. Malinau (kota) dengan tingkat kepadatan 35,58 jiwa per km² diberi skor 2 dan Tarakan dengan kepadatan penduduk 157 jiwa per Km² diberi skor 1

Tabel 6 Variabel Aksesibilitas

NO	KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	BOBOT	SKOR	TOTAL
A. Ketersediaan Akses Ke Daerah Lain (Dalam Wilayah Calon Provinsi Kalimantan Utara)					
1	Bulungan	Darat, Laut /Sungai & Udara	10	3	30
2	Malinau	Darat, Laut /Sungai & Udara	10	3	30
3	Nunukan	Darat, Laut /Sungai & Udara	10	3	30
4	Tarakan	Darat, Laut /Sungai & Udara	10	1	10
B. Ketersediaan Akses Ke Daerah Lain (diluar Wilayah Calon Provinsi Kalimantan Utara)					
1	Bulungan		10	2	20
2	Malinau		10	2	20
3	Nunukan		10	2	20
4	Tarakan		10	4	40

Sumber: Lpaoran Kajian Unmul 2006

Variabel aksesibilitas dibagi dalam dua indikator yang masing-masing memiliki satu sub indikator. Untuk sub indikator tentang ketersediaan akses ke daerah lain dalam wilayah calon Provinsi Kalimantan Utara, Bulungan, Malinau dan Nunukan yang masing-masing memiliki akses melalui darat, laut/sungai, dan udara, diberi skor rata-rata 3, sehingga untuk Tarakan yang hanya memiliki akses melalui laut dan udara diberi skor 1.

Sedangkan untuk sub indikator tentang kemudahan akses ke daerah lain di wilayah calon Provinsi Kalimantan Utara, Bulungan yang jika melewati udara harus transit melalui Tarakan tetapi bisa langsung ke Samarinda melalui darat, diberi skor 3, untuk Malinau yang juga harus transit di Tarakan diberi skor 1. Sedangkan Nunukan yang sekalipun harus transit ke Tarakan tetapi memiliki akses ke Luar Negeri diberi skor 2. Dan Tarakan sendiri yang memiliki akses paling cepat untuk ke luar daerah di beri skor 4.

Sumber: Kajian UNMUL 2006

Variabel lingkungan dibagi dalam dua indikator yang masing-masing memiliki satu sub indikator. Untuk sub indikator tentang ketersediaan sumber air bersih, Bulungan, Malinau dan Nunuka masing-masing diberi skor 3, karena memiliki sumber air bersih yang sama yaitu berasal dari air hujan, air tanah dan air sungai. Sedangkan Tarakan diberi skor 1, karena hanya memiliki

Tabel 7 Variabel Lingkungan

NO	KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	BOBOT	SKOR	TOTAL
A. Ketersediaan Air Bersih (Ketersediaan Air Bersih)					
1	Bulungan	Sungai, Air tanah, Air Hujan	10	3	30
2	Malinau	Sungai, Air tanah, Air Hujan	10	3	30
3	Nunukan	Sungai, Air tanah, Air Hujan	10	3	30
4	Tarakan	Sungai, Air tanah, Air Hujan	10	1	10
B. Kerentanan Wilayah Terhadap Bencana Alam					
1	Bulungan	Banjir	10	3	30
2	Malinau	Banjir	10	3	30
3	Nunukan	Banjir	10	3	30
4	Tarakan	Banjir, Abrasi, Longsor	10	1	10

sumber air bersih yang berasal dari air hujan dan air tanah. Sedangkan untuk sub indikator kerentanan wilayah terhadap bencana alam (banjir, longsor, gempa dan abrasi), Bulungan, Malinau dan Nunukan yang rata-rata diberi skor 3. Sedangkan Kota Tarakan yang pernah mengalami banjir, longsor dan abrasi diberi skor 1.

Tabel 8 Variabel Pertahanan dan Keamanan

NO	KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	BOBOT	SKOR	TOTAL
A. Tingkat Kriminalitas					
1	Bulungan	34 Kasus	5	3	15
2	Malinau	5 Kasus	5	4	20
3	Nunukan	283 Kasus	5	2	10
4	Tarakan	361 Kasus	5	1	5
B. Jumlah Lembaga Hankam					
1	Bulungan	2	5	2	10
2	Malinau	2	5	2	10
3	Nunukan	2	5	2	10
4	Tarakan	4	5	4	20

Sumber: Kajian UNMUL 2006

Variabel pertahanan dan keamanan dibagi menjadi dua indikator yang masing-masing memiliki satu sub indikator. Untuk sub indikator tingkat kriminalitas Bulungan sebanyak 34 kasus diberi skor 3, sedangkan Malinau dengan 5 kasus diberi skor 4, sedangkan Nunukan yang memiliki tingkat kriminalitas sebanyak 283 kasus diberi skor 2 dan Tarakan dengan tingkat kriminalitas sebanyak 361 kasus diberi skor 1.

Sedangkan untuk sub indikator tentang kepemilikan lembaga-lembaga ketahanan atau angkatan bersenjata. Untuk Bulungan, Malinau dan Nunukan masing-masing hanya memiliki Angkatan Darat dan Kepolisian diberi skor 2, sedangkan untuk Tarakan yang memiliki Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta Kepolisian diberi skor 4.

Tabel 9 Variabel Aspirasi Masyarakat

NO	Kabupaten/Kota	INDIKATOR	BOBOT	SKOR	TOTAL
Dukungan Pribadi (150 Responden)					
1	Bulungan	90 Responden (60%)	15	4	60
2	Malinau	9 Responden (6%)	15	2	30

3	Nunukan	1 Responden (0,7%)	15	1	15
4	Tarakan	50 Responden (33,3%)	13	3	45

Sumber: Kajian UNMUL 2006

Variabel aspirasi masyarakat dituangkan dalam dua indikator dan memiliki satu sub indikator. Untuk sub indikator yang berkaitan dengan dukungan secara pribadi yang diberikan oleh masyarakat di Kabupaten/Kota berjumlah 150 orang. Bulungan yang didukung oleh 90 responden (60%) diberi skor 4, sedangkan Malinau diberi dukungan 9 responden (6%), diberi skor 2. Dan Nunukan yang didukung oleh 1 responden (0,7%) diberi skor 1, sedangkan Tarakan yang didukung oleh 50 responden (33.3%) diberi skor 3.

Jumlah Skor Variabel Penelitian

NO	Variabel	Jumlah Indikator	Kabupaten/Kota			
			Bulungan	Malinau	Nunukan	Tarakan
1	Tata Ruang Kota	2	90	30	90	90
2	Fasilitas Pelayanan	4	80	45	120	155
3	Infrastruktur	5	162,5	180	127,5	180
4	Faktor Perekonomian	2	30	40	50	80
5	Kependudukan	2	60	30	60	50
6	Aksesibilitas	2	60	40	50	50
7	Lingkungan	2	60	60	60	20
8	Pertanahan dan Keamanan	2	25	30	20	25
9	Aspirasi Masyarakat	1	60	30	15	45
			727,5	485	592,5	695

Dari seluruh yang dibagi dalam masing-masing indikator dan sub

indikator, Kabupaten Bulungan memperoleh skor tinggi untuk beberapa indikator dan sub indikator, demikian juga dengan kota Tarakan. Sedangkan untuk Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau memperoleh skor yang relative lebih rendah dibandingkan kedua daerah Kabupaten Kota tersebut.

D. Evaluasi Penentuan Tanjung Selor Sebagai Ibukota

Setelah mengetahui bagaimana dasar hukum pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan

bagaimana pula prosedur penentuan Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi, selanjutnya yang menjadi pembahasan adalah bagaimana evaluasi Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara. Namun sebelum itu, ada baiknya untuk mengetahui apa arti dari evaluasi. Berikut ini definisinya³⁷:

- f. Menurut Abdul Jabar (2007), evaluasi berarti pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam objek dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan yang terjadi.
- g. Menurut Cronbach dan Stufflebeam, proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan.

a. Sejarah dan Politis

Memang pada awalnya kami sangat mendukung Ibukota Provinsi Kalimantan Utara itu berada di Kota Tarakan, tetapi karena ada pertimbangan lain dari Gubernur Kalimantan Timur pada waktu itu sehingga mereka melihat bahwa ada sejarah yang tidak bisa dinafikkan. Kalimantan Utara ini induknya hanya satu, yakni Kabupaten Bulungan sehingga kami tidak permasalahan lagi lokasi ibukota karena kala itu yang lebih utama adalah Kalimantan Utara yang harus lahir sebagai provinsi baru.

³⁷ <https://www.dosenpendidikan.co.id/tag/pengertian-evaluasi-menurut-para-ahli-dan-daftar-pustakanya/> (Diakses Pada tanggal 23/12/2020, pukul 19.26)

Tujuannya adalah untuk pembangunan masyarakat, dimanapun ibukotanya pada saat itu saya rasa tidak ada masalah. Akan tetapi jika kita melihat lagi pada infrastruktur yang tersedia, memang yang paling pantas menduduki kursi ibukota adalah Kota Tarakan. Sebenarnya polemik seperti inilah yang harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menentukan sebaiknya lokasi ibukota itu dimana, bukan hanya karena kemauan daerah. Hal ini dikarenakan kita sedang berbicara tentang infrastruktur.

Wilayah di Kalimantan Utara yang paling siap untuk itu memang Kota Tarakan. Dapat dibuktikan dengan adanya pelabuhan-pelabuhan besar dan bandara internasional semuanya sudah benar-benar siap. Fasilitas seperti sekolah, kampus, rumah sakit, hotel semuanya lebih lengkap berada di Kota Tarakan. Hingga saat ini untuk Tanjung Selor saya rasa masih banyak hal-hal keberpihakan untuk kepentingan masyarakat yang belum terpenuhi. Dari itu memang dibutuhkan pembangunan dan perbaikan kualitasnya, dan sudah seharusnya kebutuhan dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pembangunan di ibukota Provinsi.

Kemudian jika kita beralih pada pertanyaan apakah penentuan ibukota provinsi itu harus memenuhi semua aspek yang ada di pasal 12 ayat (3) PP. No. 78 tahun 2007, saat ini pilihan yang lebih dulu dilakukan adalah menentukan lokasi ibukota yang selanjutnya dilakukan pembangunan demi memenuhi segala aspek yang ada pada aturan tersebut. Jadi bisa dikatakan “sambil jalan” seiring dengan ditetapkannya Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kaltara, begitupula pemenuhan aspek-aspek akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.³⁸

Jika kita bercermin pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 ini khususnya pasal 12 ayat (3), penetapan Tanjung Selor memang

³⁸ H. Udin Hianggio, (73 Tahun), Tokoh Pejuang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, *Wawancara*, Kediaman H. Udin Hianggio, Ahad, 08 November 2020, Pukul 14.50.

bukan berdasarkan norma yang ada di pasal tersebut, tapi lebih kepada aspek sejarah dan politik. Berbicara mengenai kajian akademis, saya merasa tidak ada melainkan penentuan secara politis yang lebih kuat dan mendominasi kala itu. Karena menurut saya pribadi sebenarnya Bulungan (Tanjung Selor ini) memiliki kekalahan skor dari banyak aspek dibandingkan kandidat daerah calon ibukota lainnya seperti Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau.³⁹

“Jangan Melupakan Sejarah” demikianlah kutipan dari bapak proklamator kita, Ir. Soekarno. Sejarah adalah peristiwa lampau yang sarat akan makna, seperti halnya dengan Kesultanan Bulungan. Tanjung Selor dan daerah-daerah lain di Kalimantan Utara merupakan wilayah kesatuan Kesultanan Bulungan, kita tidak boleh amnesia pada kejayaan pada masa itu. Sehingga penempatan ibukota di Bulungan (Tanjung Selor) salah satu tujuan utamanya ialah mengembalikan pemerintahan sebagaimana dahulu masa Kesultanan Bulungan. Selain menjadi induk dari daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Utara, Kesultanan Bulungan juga telah memberikan kontribusi besar untuk negara ini. Sejarah ini cukup menjadi alasan kuat untuk menetapkan lokasi ibukota berkedudukan di Tanjung Selor.

b. Keterbatasan SPBU

Mendengar Ibukota Provinsi berada disini (Tanjung Selor) saya merasa lega karena pembangunan pasti akan segera dilakukan. Namun keberadaan SPBU sangat terbatas, hanya ada dua. Hal itu menyebabkan kami para supir angkot harus mengantri berjam-jam lamanya agar bisa mendapatkan bahan bakar, saya merasa SPBU di Tanjung Selor harus ditambah jumlahnya, sehingga dapat memudahkan kami mengisi bahan bakar tanpa harus mengantri panjang dan menghabiskan banyak waktu. Sekitar jam 8 sampai 9 pagi

³⁹ Dian Suryanata (38 Tahun), Kasubbid Penelitian Sumber Daya, *Wawancara*, Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Jumat 23 Oktober 2020, Pukul 09.49.

memang akan begitu sulit menemukan angkot, karena pada waktu-waktu demikian kami sedang mengantri bahan bakar di SPBU.

Tidak hanya perkara SPBU yang sangat terbatas, infrastruktur jalan juga harus diperbaiki. Ketika saya mengantar beberapa penumpang, saya mengalami kesulitan karena akses jalan yang rusak. Saya benar-benar berharap secepatnya pemerataan pembangunan khususnya akses jalan raya sampai ke jalan-jalan rumah masyarakat dapat segera mengalami perbaikan, agar mudah terjangkau dan menghemat waktu tempuh.⁴⁰

Salah satu kriteria penentuan ibukota provinsi adalah aksesibilitas, yakni kemudahan akses baik darat, laut maupun udara. Skor fatal yang juga memicu kekalahan telak Kota Tarakan karena tidak memiliki salah satu akses, yaitu akses darat. Sedangkan Tanjung Selor memiliki akses tersebut, jika akses darat sangat dibutuhkan masyarakat maka sudah selayaknya didukung oleh infrastruktur jalan yang baik dan juga keberadaan SPBU yang memadai. Namun pada kenyataannya, masih saja ada jalan yang mengalami kerusakan. Hal ini tentu akan menghambat masyarakat yang mengandalkan transportasi darat, memakan banyak waktu tempuh. Tidak hanya itu, SPBU merupakan unsur yang harus mencukupi kebutuhan masyarakat. Penambahan SPBU tentu akan mengurangi antrian panjang serta masyarakat tidak akan kesulitan lagi mendapatkan bahan bakar.

c. Mahalnya Harga Kebutuhan Pokok dan Makanan (perekonomian)

Beralih ke aspek perekonomian, salah satu penentu kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Disini memang harga makanan siap saji seperti ayam geprek yang saya jual relatif lebih mahal,

⁴⁰ Pak Mahmud (54 Tahun), Supir Angkot, *Wawancara*, Angkot Pak Mahmud, Sabtu, 24 Oktober 2020, Pukul 10.02.

hal tersebut saya lakukan karena mengikuti harga bahan baku yang juga mahal. Kalau menurut saya ini bisa mungkin saja karena faktor akses atau barang yang harus mengalami beberapa kali transit sehingga menjadikan harganya lebih mahal. Di Tanjung Selor ini memang tidak ada pelabuhan besar yang bisa menampung kapal-kapal besar pembawa barang. Biasanya kapal itu sandar di Tarakan, kemudian menggunakan speedboat lagi untuk sampai kesini, jumlahnya juga tentu terbatas karena diangkut oleh kapal yang lebih kecil, bisa jadi karena inilah kenaikan harga barang atau bahan baku menjadi lebih tinggi. Sebenarnya kami juga tidak ingin menjual ayam geprek dengan harga yang terbilang mahal ini, akan tetapi sebagai pedagang kecil-kecilan saya juga ingin meraup sedikit untung dengan mempertimbangkan harga bahan baku dan harga jual.⁴¹

Tingginya harga makanan dan kebutuhan lain di Tanjung Selor memang masih menjadi perbincangan hangat. Harga yang melambung itu kerap kali mengagetkan para pendatang yang berkunjung ke Tanjung Selor. Kenaikan harga dapat dipicu oleh beberapa faktor, dapat juga dikarenakan akses yang sulit sehingga menyebabkan harga kirim yang lebih mahal dari daerah lainnya. Kita juga tidak bisa menyalahkan pedagang atas harga-harga tersebut, akan tetapi fenomena ini wajib dicari solusi oleh pemerintah. Tingginya harga menjadi hal tabu, karena seperti yang kita ketahui bersama biasanya harga-harga yang ada di ibukota jauh lebih murah dibandingkan daerah lain yang tidak berstatus ibukota.

d. Pendidikan

Selain aspek fasilitas dan perekonomian, aspek pendidikan juga tidak kalah pentingnya. Domisili saya di Tanjung Selor tapi saya harus merantau ke Kota Tarakan, disana saya mengontrak di sebuah rumah. Hal

⁴¹ Ibu Nengsih, (47 Tahun), Pedagang Makanan, *Wawancara*, Warung Makan Bu Nengsih, Sabtu 24 Oktober 2020, Pukul 13.16.

ini saya lakukan karena di Kota Tarakan memiliki Universitas Negeri yang kini menjadi tempat saya menimba ilmu di bangku perkuliahan. Saya mewakili mahasiswa- mahasiswa Kalimantan Utara memiliki keluhan yang sama yakni tidak adanya Universitas negeri di Tanjung Selor, padahal seharusnya sebuah ibukota provinsi itu memiliki fasilitas demikian demi menunjang para pemuda dalam menggapai cita-citanya. Saya tidak bermaksud menyalahkan ketidaktersediaan fasilitas pendidikan yang memadai di ibukota provinsi, karena mungkin banyak pertimbangan pemerintah atau kendala-kendala yang masih belum teratasi sehingga pendirian

Universitas yang bersatus Negeri belum bisa terealisasi. Sehingga kedepannya saya benar- benar berharap agar generasi setelah saya tidak harus merantau jauh dari orang tua untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Universitas Negeri yang senantiasa menjadi impian, semoga segera hadir di Tanjung Selor.⁴²

Merantau, jauh dari orang tua demi secercah impian. Keputusan ini tidaklah mudah, ditambah lagi seorang anak perempuan yang pergi meninggalkan keluarga memilih hidup mandiri, melakukan segalanya sendiri. Kebutuhan akan pendidikan memang menjadi alasan beberapa pemuda untuk pergi meninggalkan Tanjung Selor, mencari tempat dimana perguruan tinggi negeri bisa didapatkan. Yah, permasalahan tidak adanya universitas yang berstatus negeri di Tanjung Selor juga menjadi topik pembahasan di meja-meja mahasiswa. Tentang bagaimana sulitnya jika di sebuah ibukota provinsi tidak memiliki perguruan tinggi negeri, mungkin memang butuh waktu untuk mengubah status swasta itu menjadi negeri, akan tetapi besar harapan mahasiswa Kalimantan Utara agar ibukota Provinsinya memiliki sekurang-kurang satu perguruan tinggi berbasis Negeri.

⁴² Fania Sari, (21 Tahun), Mahasiswa UBT yang berasal dari Tanjung Selor, Wawancara, Kontrakan Fania, Senin 09 November 2020, Pukul 10.02.

e. Akses Keluar Daerah

Sebagai salah satu mahasiswa yang berasal dari Tanjung Selor namun berkuliah di Makassar tentu saja saya sering melakukan perjalanan pulang pergi dari Makassar ke Tanjung Selor atau sebaliknya. Namun akses dan fasilitas yang tersedia kurang memadai, di Tanjung Selor memang ada satu bandara, tapi bandara ini tergolong kecil dan penerbangan yang tersedia hanya sampai ke Balikpapan. Sehingga perlu dilakukan penerbangan lain agar saya dapat sampai ke Makassar. Untuk mengakali hal demikian, saya memilih untuk melakukan perjalanan laut menggunakan kapal kecil ke Kota Tarakan lalu menggunakan akses bandara yang ada disana untuk menuju Kota Makassar.

Hal ini dikarena Kota Tarakan satu-satunya yang memiliki bandara internasional sekaligus sebagai akses tercepat melalui udara. Dengan ini tentu saya ingin Bandara Tanjung Harapan yang ada di ibukota Provinsi Kalimantan Utara ini dapat segera berstatus internasional, tidak hanya terbatas penerbangan menuju Balikpapan tapi juga ke daerah-daerah jauh lainnya, khususnya lokasi kampus saya di Makassar.⁴³

Hingga saat ini, Tanjung Selor masih memiliki keterbatasan di sektor penerbangan. Tidak adanya akses penerbangan yang melebihi rute menuju Balikpapan, menyebabkan sulitnya menjangkau daerah-daerah luar. Bandara Tanjung Harapan memang tergolong kecil, panjang lintasan sekitar 1.200 meter masih belum cukup. Jika ingin melakukan perjalanan ke luar daerah, kita harus transit melalui Kota Tarakan terlebih dahulu. Brstatus internasional, Bandara Juwata Tarakan memang seringkali menjadi andalan untuk masyarakat Kalimantan Utara yang ingin berpergian jauh atau ingin menghemat waktu tempuh.

⁴³ Arselino Septa, (22 Tahun), Mahasiswa Makassar yang berdomisili di Tanjung Selor, *Wawancara*, Kediaman Arselino, Selasa 10 November 2020, Pukul 13.02)



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dan saran yang dapat ditarik adalah berikut ini:

A. Kesimpulan

1. Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Kalimantan Utara Menurut Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah telah sesuai dengan prosedur atau alur yang ditentukan secara normative dan menyeluruh terhadap syarat atau kriteria menurut persyaratan administrative, teknis maupun fisik kewilayahan. Provinsi Kalimantan Utara telah siap lepas dari provinsi induk dan juga dinyatakan memenuhi syarat, meski pada praktiknya menemui berbagai rintangan dan kendala. Tidak mudah dan menyita waktu yang tidak sebentar sehingga bisa mewujudkan sebuah pemekaran daerah otonomi baru. Eksistensi Provinsi Kalimantan Utara resmi dirintis sejak diberlakukannya Undang Undang No. 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dengan Tanjung Selor (Bulungan) sebagai ibukota Provinsi. Sumber daya alam seperti, batu bara, kelapa sawit, perikanan, pertanian, dan berbagai potensi lokal lainnya diharapkan dapat segera dikelola dengan optimal. Sehingga Kalimantan Utara mampu menjadi provinsi yang mandiri, terdepan dan berdaya saing.

2. Evaluasi penentuan Tanjung Selor Sebagai Ibukota Provinsi

Kalimantan Utara. Walaupun telah berjalan delapan tahun pemerintahan, Evaluasi yang dilakukan terhadap ibukota Provinsi Kalimantan Utara ternyata memberi jawaban yang sangat mengkhawatirkan. Berbagai pembangunan yang berpihak kepada masyarakat banyak belum juga terealisasi. Padahal jika menelaah kembali tujuan dibentuknya Provinsi Kalimantan Utara adalah demi percepatan pembangunan. Penambahan SPBU, perbaikan infrastruktur jalan, stabilitas perekonomian, pemerataan sarana pendidikan, aksesibilitas serta masih banyak lagi pembangunan yang harus dilakukan.

B. Saran

- a) Syarat dan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, ternyata lebih sulit dibanding peraturan yang mengatur mengenai pemekaran sebelumnya. Fenomena ini menjadi permasalahan yang cukup pelik apabila ada daerah yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007. Daerah tersebut otomatis tidak akan lolos, sehingga hal ini tentu berdampak serius karena terjadi pembatalan pengajuan pemekaran daerah. Sebaiknya, pemerintah provinsi induk memberi arahan dan juga pembinaan agar calon provinsi baru dapat tumbuh dan berkembang yang kemudian mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya demi peningkatan

kesejahteraan masyarakat setempat.

- b) Penulis berharap Tanjung Selor yang telah menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Utara mampu menjadi daerah yang paling strategis dan memiliki kelengkapan infrastruktur yang lebih daripada daerah lainnya. Evaluasi harus terus dilakukan agar pembangunan di Tanjung Selor tidak berhenti. Masyarakat juga tidak bisa hanya duduk berpangku tangan, pengawasan dari berbagai elemen masyarakat diperlukan agar pembangunan di Tanjung Selor benar-benar berpihak pada kehendak rakyat bukan berdasarkan kepentingan politik atau kelompok yang mempunyai tujuan terselubung untuk memperkaya diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muh. Yamin. *Naskah Persiapan UUD 1945*. 1971, Jakarta, Siguntang
- Joeniarto. *Perkembangan Pemerintahan Lokal*. 1992, Jakarta, Bina Aksara
- Sodik Achmad, S.H., M.H, Ir. H. Rian Juniarso, M.Si., M.H., *Hukum Tata Ruang*, 2008, Bandung, Nuansa Cendekia.
- Forestyana Sandra, Ikaputra, Kurniawan Harry, *Perancangan Aksesibilitas Untuk Fasilitas Publik*, 2014, Bulak Sumur, Gadjah Mada University Press.
- Salahudin A. Jaco, *Ekonomi Pasar Sosial Sejarah dan Latar Belakang*, 2018, Surabaya, CV. Garuda Mas Sejahtera.
- Dr. Syechalad Nur Muhammad, M.Si, *Perkebunan Dalam Kajian Sosial Ekonomi*, 2009, Banda Aceh, PeNa Banda Aceh
- Dr. Djuyandi Yusa, SIP., M.Si., *Pengantar Ilmu Politik*, 2017. Depok, Rajawali Press
- Surahmat, Rokhman Fatur, *Politik Bahasa Penguasa*, 2016, Jakarta, Kompas Mesia Nusantara
- Yulianthi, S.S.T, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, 2019. Yogyakarta. Depublish
- Tammi Prastowo, *Negara Kesatuan Republik Indonesia*. 2018. Klaten. Cempaka putih
- Widada SH. *Mengenal Pemerintahan Daerah*. 2018. Singkawang. PT. Maraga Borneo Tarigas
- Yudi Suparyanto. *Otonomi Daerah Dalam Kerangka NKRI*. 2018. Klaten. Cempaka putih
- Dr. Natsif Andi Fadli, S.H., M.H., *Ketika Hukum Berbicara*. 2018. Jakarta. Prenadamedia Group
- Jurnal, Internet dan Artikel
- Badan Pusat Statistik, Luas Daerah dan Jumlah Pulau, 30 Agustus 2020, <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html> (Diakses Pada Tanggal 30 Agustus 2020, Pukul 14.20)
- Portal Resmi Kalimantan Utara, Kaltaraprov.go.id, 30 Agustus 2020
<https://kaltaraprov.go.id/profil/sejarah> (Diakses pada tanggal 30 Agustus, pukul

14.29)

Ensiklopedia Bebas, Kalimantan Utara, 31 Agustus 2020,
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Utara (Diakses pada tanggal 31 Agustus 2020, pukul 08.45)

Bulungan.go.id, Letak dan Batas Wilayah, 31 Agustus 2020,
<https://bulungan.go.id/v5/index.php/bulungan/letak-dan-batas-wilayah> (Diakses pada tanggal 31 Agustus 2020, pukul 08.56)

<https://tafsirweb.com/562-quran-surat-al-baqarah-ayat-126.html> (diakses tanggal 09 November 2020, pukul 06.23)

<https://tafsirweb.com/9944-quran-surat-az-zariyat-ayat-48.html> (dikutip tanggal 09 November 2020, pukul 06.00)

Suryawijayanti. 2012. *"Tarakan Mengalah Tak Jadi Ibukota"*. KBR Prime, 03 Desember 2012, Dilihat 17 April 2020. <https://kbr.id/12-2012/tarakan-mengalah-tak-jadi-ibukota-kalimantan-utara/59408.html>

PP. Nomor 78 Tahun 2007, (29 Juni 2020),
<https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/27352/node/583/pp-no78-tahun-2007-tata-cara-pembentukan,-penghapusan,-dan-penggabungan-daerah>

Godam64, Pengertian Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, 06 September 2020,
<http://www.organisasi.org/1970/01/arti-pengertian-fasilitas-umum-dan-fasilitas-sosial-perbedaan-fasum-fasos.html>, diakses pada 06 September 2020, pukul 14.37.

Pak Dosen, Dosen.Geografi.Com, Pengertian, Letak Geografis menurut para ahli, 07 September 2020,
https://dosengeografi.com/letakgeografis/#Pengertian_Letak_Geografis_Menurut_Para_Ahli (Diakses pada tanggal 07 September 2020, pukul 09.44)

Blogspot, Pengertian Kependudukan, 07 September 2020, <https://kependudukan-ri.blogspot.com/p/pengertian-kependudukan-penduduk-adalah.html> (diakses pada tanggal 07 September 2020, pukul 13.45)

Aris Kurniawan, Kehidupan Sosial Ekonomi, 07 September 2020,
<https://www.gurupendidikan.co.id/kehidupan-sosial-ekonomi/> (diakses pada tanggal 07 September 2020, pukul 14.15)

Afdhal Rizqi, Sosial dan Politik, 07 September 2020

<https://afdhalrizqi.wordpress.com/2011/03/08/sosial-dan-politik/> (diakses pada tanggal 07 September 2020, pukul 14.48)

Zakky, Pengertian Implementasi Menurut KBBI, Para Ahli dan Secara, Umum, 08 September 2020 <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/> (diakses pada tanggal 08 September 2020, pukul 14.13)

2020 <https://bulungan.go.id/v5/index.php/profil-kecamatan> (diakses pada tanggal Muh. Zulkifri Syamat, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemindahan Pusat Ibu Kota Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat*", vol. 7 no. 1, 01 Juni 2020, h. 47, <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan>

Bulungan.go.id, Profil Kecamatan Tanjung Selor, 08 September 08 September 2020, pukul 14.50)

Id.thesis.com, Penelitian Hukum Empiris, 30 Agustus 2020 <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> (Diakses pada tanggal 30 Agustus 2020, pukul 11.45)

Fadlun Maros, Penelitian Lapangan, 30 Agustus 2020 [https://www.academia.edu/24308046/PENELITIAN LAPANGAN FIELD RESEARCH PADA METODE KUALITATIF](https://www.academia.edu/24308046/PENELITIAN_LAPANGAN_FIELD_RESEARCH_PADA METODE KUALITATIF) (Diakses pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 11.00)

Pak Dosen, Penelitian Kualitatif, 08 September 2020. <https://pakdosen.pengajar.co.id/penelitian-kualitatif/#ftoc-heading-4> (Diakses pada tanggal 08 september 2020, pukul 21.52)

Dr. Jumadi, S.H., M.H., *Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-undangan Di Indonesia*, Hal. 27-28 (Diakses Tanggal 09 November 2020, pukul 19.55)

Ahkam Jayadi SH., M.H., *Membuka Tabir Kesadaran Hukum*, Jurisprudentie Volume 4 Nomor 2 Desember 2017, Hal. 12 (diakses tanggal 09 November Pukul 19.31)

Undang-Undang

PP. No. 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

UU No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

UU. No. 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara

UU. No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

UU. No. 23 Tahun 2014 Tentang PERDA

PP. 129 Tahun 2000 Tentang

Persyaratan dan Kriteria Pembentukan,
Penghapusan dan Penggabungan
Daerah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Sarda Safitri lahir di Enrekang pada tanggal 18 November 1999. Anak dari pasangan Bapak Muhaidir dan Ibu Haspiah yang merupakan anak sulung dari empat bersaudara.

Penulis berdomisili di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, pernah menempuh pendidikan formal di SDN No. 005 Tarakan pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 3 Tarakan pada tahun 2011. Lalu, meneruskan lagi pendidikan di bangku sekolah menengah atas di SMAN 2 Tarakan pada tahun 2014. Setelah menempuh pendidikan SMA, penulis mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dengan mengambil program studi Ilmu Hukum.

